



BRAVO PRESS

EKONOMI PUBLIK



Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., M.E | Hendry Cahyono, S.E., M.E
Dr.Lucky Rachmawati S.E., M.Si | Wenny Restikasari, M.SE
Aminudin Ma'ruf, M.Sc.

EKONOMI PUBLIK

Penulis:

Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., M.E

Hendry Cahyono, S.E., M.E.

Dr. Lucky Rachmawati S.E., M.Si

Wenny Restikasari, M.SE

Aminudin Ma'ruf, M.Sc.



BRAVO PRESS

CV. BRAVO PRESS INDONESIA

EKONOMI PUBLIK

Penulis :

Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., M.E | Hendry Cahyono, S.E., M.E. | Dr.Lucky Rachmawati S.E., M.Si | Wenny Restikasari, M.SE | Aminudin Ma'ruf, M.Sc.

ISBN : 978-623-10-1922-6

Editor : Weni Yuliani, S.Si., MM

Penyunting : Taufik Hidayat, SKom., M.Kom

Desain Sampul dan Tata Letak : Aviva Anisyah, S.Pd

Penerbit : CV. BRAVO PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 022/RAU/2024

Redaksi :

Perumahan Indah Harisanda blok f6 Jalan saudara RT 03/RW 06
Kel/Desa Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau

Website : www.bravopress.id

Email : bravopressindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku referensi dengan judul "Ekonomi Publik" ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ekonomi publik, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta para praktisi yang berkecimpung di bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah menggunakan instrumen ekonomi untuk memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai konsep dan teori dasar dalam ekonomi publik, seperti kebijakan fiskal, pajak, belanja pemerintah, dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan serta efisiensi ekonomi.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan kritik

yang membangun, sehingga buku ini dapat tersusun dengan lebih baik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berharga dalam memahami ekonomi publik serta dapat diaplikasikan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan.

Surabaya, Juli 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI PUBLIK	1
1.1 Definisi Ekonomika Publik.....	2
1.2 Komponen Sektor Publik.....	4
1.3 Lingkup dan Proses Kegiatan Ekonomi Publik	6
BAB 2 MENGANALISIS KEGAGALAN PASAR DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN	11
2.1 Kelemahan Ekonomi Pasar	12
2.2 Fungsi Campur Tangan Pemerintah.....	14
2.3 Kurva Phillips.....	16
2.4 Hukum Wagner	19
2.5 Menganalisis Kegagalan Pasar.....	21
2.6 Menganalisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian.....	23
2.7 Menganalisis Peranan Pemerintah dalam Perdagangan Internasional.....	25
2.8 Menganalisis Penyebab Gagalnya Peran Pemerintah dalam Perekonomian	26
BAB 3 MENGANALISIS BARANG DAN JASA PUBLIK	29

3.1 Pengertian Barang dan Jasa Publik serta Barang dan Jasa Privat.....	30
3.2 Penentuan Jumlah Persediaan dan Harga Barang Publik dan Barang Privat	32
3.3 Menganalisis Pelayanan Publik.....	34
BAB 4 MENGANALISIS KEBIJAKAN FISKAL	37
4.1 Memahami Sejarah Kebijakan Fiskal.....	37
4.2 Menjelaskan Ruang Lingkup dan Pengertian Kebijakan Fiskal	39
4.3 Menjelaskan Tahapan dan Analisis Kebijakan Fiskal.....	40
4.4 Menganalisis Tujuan Kebijakan Fiskal	42
4.5 Menganalisis Jenis Kebijakan Fiskal	43
BAB 5 MENGANALISIS KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH ERA OTONOMI DAERAH	47
5.1 Menjelaskan Arti, Tujuan dan Fungsi APBN	48
5.2 Memahami Prinsip, Asas dan Landasan Hukum dan Cara Penyusunan APBN.....	49
5.3 Menganalisis Kebijakan APBN	51
5.4 Menganalisis Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara	52
5.5 Menganalisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara..	54
5.6 Memahami Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	55
5.7 Memahami Asas Umum dan Struktur APBD.....	57

5.8 Menganalisis Tahap-tahap Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Penentuan Strategi dan Prioritas APBD.....	58
BAB 6 MENGANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DALAM PEREKONOMIAN.....	63
6.1 Memahami Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	64
6.2 Menganalisis Potensi Penerimaan/ Pendapatan Daerah.	65
6.3 Menganalisis Penghitungan Potensi Pendapatan Basis Mikro	67
BAB 7 MENGANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM PEREKONOMIAN	73
7.1 Sejarah Perkembangan Pajak	74
7.2 Pengertian dan Prinsip Pengenaan Pajak	75
7.3 Pajak langsung dan Pajak Tidak Langsung	79
7.4 Menjelaskan Tarif Pajak	82
7.5 Menganalisis Pengaruh Pengenaan Pajak terhadap Perilaku Ekonomi.....	84
7.6 Menganalisis Faktor Penentu Penerimaan Perpajakan.....	85
7.7 Menganalisis Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	87
7.8 Menganalisis Tolak Ukur Kinerja Penerimaan Perpajakan Suatu Daerah	88
7.9 Menganalisis Pajak Daerah, Jenis Pajak Daerah.....	90

7.10 Memahami Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah	91
7.11 Menganalisis Bagi Hasil Pajak Daerah.....	93
7.12 Menganalisis Retribusi Daerah	95
BAB 8 MENGANALISIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN NEGARA DAN DAERAH	97
8.1 Menganalisis Pinjaman Negara.....	98
8.2 Menganalisis Surat Utang Negara	99
8.3 Menganalisis Pinjaman Daerah.....	100
8.4 Menganalisis Obligasi Daerah	102
BAB 9 MENGANALISIS PENERIMAAN DAERAH (DESA)	105
9.1 Menganalisis Desa dan Dana Desa	106
9.2 Menganalisis Regulasi Penentuan Jumlah Dana Desa	107
9.3 Menganalisis Penggunaan Dana Desa.....	109
9.4 Menganalisis Keuangan Desa dan Struktur APBDesa	110
BAB 10 MENGANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	113
10.1 Memahami Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	114
10.2 Menjelaskan Prinsip-Prinsip Pokok Pengeluaran Pemerintah	115

10.3 Menganalisis Penyebab Peningkatan Pengeluaran Daerah	117
10.4 Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian	118
BAB 11 MENGANALISIS BALANCED BUDGET (DANA PERIMBANGAN)	125
11.1 Menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH)	126
11.2 Menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU).....	127
BAB 12 MENGANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH	129
12.1 Mampu Menganalisis Belanja Modal Sebagai Modal Investasi	130
12.2 Menganalisis Kategori Investasi Sektor Publik	131
12.3 Menganalisis Kategori Akuntansi Belanja Modal.....	132
12.4 Menganalisis Kemitraan Pemerintah Daerah.....	134
12.5 Menganalisis Pertimbangan dan Resiko Investasi Publik	135
12.6 Menganalisis Kebijakan Lelang Terbuka	136
12.7 Menganalisis Kebijakan Publik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	138
BAB 13 MENGANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH, KINERJA SEKTOR PUBLIK, DAN KINERJA EKONOMI PUBLIK	141
13.1 Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah	141
13.2 Menganalisis Kinerja Sektor Publik	143

13.3 Menganalisis Kinerja Ekonomi Publik	144
BAB 14 MAMPU MENGANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH, KINERJA SEKTOR PUBLIK, DAN KINERJA EKONOMI PUBLIK.....	146
14.1 Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah	146
14.2 Kinerja Sektor Publik	163
14.3 Kinerja Ekonomi Publik.....	183
14.4 Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja.....	204

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kurva Philip	18
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kurva Philip dalam Tabel.....	18
Tabel 2 Tata Kelola Ekonomi	31
Tabel 3 Tata Kelola Ekonomi Daerah.....	34
Tabel 4 Tabel Teori yang Relevan Kebijakan APBD	60
Tabel 5 Potensi Pendapatan Basis Mikro.....	69
Tabel 6 Definisi dan Pengenaan Pajak Langsung	77
Tabel 7 Definisi dan Pengenaan Pajak tidak Langsung	80
Tabel 8 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah.....	91

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI PUBLIK

Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjembatani mekanisme pasar dan kebutuhan masyarakat. Ia hadir untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi akibat monopoli, eksternalitas, dan informasi asimetris. Pemerintah berperan sebagai penyeimbang dengan menyediakan barang dan jasa publik, mengatur aktivitas ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan seperti persaingan sehat, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Memahami ekonomi publik membantu kita mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah, berpartisipasi dalam *discourse* publik, dan memahami tantangan pembangunan ekonomi. Dengan pengetahuan ini, kita dapat berperan aktif dalam membangun ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Ekonomi publik terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Memahaminya menjadi penting untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi semua.

1.1 Definisi Ekonomika Publik

Berikut beberapa definisi ekonomika publik

1 Menurut Hyman (1999):

Hyman dalam bukunya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mendefinisikan ekonomika publik sebagai studi tentang pengelolaan sumber daya publik dan keputusan ekonomi oleh pemerintah. Hyman menyoroti aplikasi teori ekonomi pada kebijakan publik, membangun landasan bagi pemahaman tentang bagaimana pemerintah dapat memengaruhi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan keuangan.

2 Menurut Rosen dan Gayer (2008):

Rosen dan Gayer, dalam buku "*Public Finance*," menyajikan konsep ekonomika publik sebagai analisis tentang bagaimana pemerintah memutuskan penggunaan sumber daya dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi masyarakat. Mereka menyoroti hubungan antara kebijakan fiskal, pendapatan publik, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

3 Menurut Gruber (2015):

Jonathan Gruber, dalam "*Public Finance and Public Policy*," mendefinisikan ekonomika publik sebagai kajian tentang bagaimana pemerintah dapat memecahkan masalah ekonomi

dan menyediakan layanan publik. Gruber menyoroti peran pemerintah dalam redistribusi kekayaan, pembiayaan layanan umum, dan dampak kebijakan publik terhadap masyarakat.

4 Menurut Putra (2018) dan Wahyuningsih (2019):

Putra dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dan Wahyuningsih dalam "Ekonomi Publik" menekankan pada peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah. Mereka merinci konsep ekonomika publik dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian di atas kami menyimpulkan ekonomi publik adalah bidang studi yang memfokuskan pada pengelolaan sumber daya oleh pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini mencakup aplikasi teori ekonomi pada kebijakan publik untuk memahami bagaimana pemerintah dapat memengaruhi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan keuangan. Analisis dalam ekonomi publik menekankan penggunaan sumber daya oleh pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta hubungan antara kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya.

Selain itu, ekonomi publik juga mencakup peran pemerintah dalam redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan publik. Dalam konteks yang lebih lokal, ekonomi publik juga menyoroti pentingnya pengelolaan ekonomi dan keuangan di tingkat daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah dan pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, ekonomi publik berfokus pada bagaimana keputusan pemerintah dalam mengelola sumber daya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien (Pertwi & Wasil, 2024).

1.2 Komponen Sektor Publik

Komponen sektor publik mencakup berbagai elemen yang berperan dalam penyediaan layanan dan pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor publik terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga publik, serta badan-badan yang didanai oleh anggaran negara. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan keuangan negara, dan pemberian layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, sektor publik juga mencakup regulasi dan kebijakan yang mengatur aktivitas ekonomi dan sosial, memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas terlindungi dan tercapai. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat mengevaluasi

efektivitas sektor publik dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 1 Peran Sektor Publik dalam Public Finance (Hyman, 1999):
Menurut Hyman (1999), dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," komponen sektor publik mencakup peran pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi. Pemahaman terhadap keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi menjadi dasar untuk mendiskusikan konsep-konsep ekonomi publik secara lebih mendalam.
- 2 Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Khusaini, 2006):
Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" membahas komponen sektor publik dari perspektif desentralisasi fiskal. Penekanannya pada peran daerah dalam pengelolaan ekonomi memberikan wawasan tentang bagaimana komponen sektor publik dapat berkembang dalam konteks pembangunan daerah.
- 3 Keterkaitan Sektor Publik dengan Kebijakan Global (Gruber, 2015):
Jonathan Gruber (2015) membahas "*Public Finance and Public Policy*," menggarisbawahi keterkaitan sektor publik dengan kebijakan global. Analisisnya tentang bagaimana sektor publik

beradaptasi dengan dinamika keuangan global memberikan perspektif yang penting dalam memahami kompleksitas ekonomi internasional.

4 Otonomi Daerah dan Pembangunan (Kuncoro, 2018):

Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" menyoroti komponen sektor publik dari sudut pandang otonomi daerah. Pemahaman mengenai cara pemerintah daerah berkontribusi terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan menjadi bagian integral dari konsep komponen sektor publik.

Dengan merujuk pada literatur ini, pemahaman konsep komponen sektor publik dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan peran pemerintah dalam kebijakan fiskal, desentralisasi, dimensi global, dan otonomi daerah. Setiap referensi memberikan perspektif yang berbeda dan bersifat komplementer dalam membahas aspek-aspek penting dari sektor publik.

1.3 Lingkup dan Proses Kegiatan Ekonomi Publik

Lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya publik dan melaksanakan kebijakan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Lingkup ini meliputi perencanaan anggaran, pengumpulan pendapatan melalui pajak dan

retribusi, alokasi dana untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Proses kegiatan ekonomi publik juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan program-program publik, serta evaluasi dampak kebijakan terhadap perekonomian dan masyarakat (Elsandy & Wasil, 2023). Dengan mengatur dan mengelola sumber daya ini, pemerintah berupaya mencapai tujuan-tujuan sosial-ekonomi seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Memahami lingkup dan proses ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik dan bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.

1 Peran Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal (Hyman, 1999):

Hyman (1999) menyoroti lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik dengan menekankan peran kunci pemerintah dalam kebijakan fiskal. Buku "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menguraikan bagaimana pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal, seperti pengelolaan anggaran dan pajak, untuk mencapai tujuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2 Desentralisasi Fiskal dan Pengembangan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) menggambarkan proses ekonomi publik melalui lensa desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah dalam bukunya "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah." Analisisnya menyoroti pentingnya alokasi sumber daya di tingkat daerah, memperkuat pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat berdampak secara lokal.

3 Implikasi Globalisasi dalam Kebijakan (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) membahas bagaimana ekonomi publik beroperasi dalam skala global melalui "*Public Finance and Public Policy*." Buku ini menyelidiki implikasi globalisasi dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi publik, memberikan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam konteks global.

4 Otonomi Daerah dan Peran Pemerintah Lokal (Kuncoro, 2018):

Kuncoro (2018) memperluas pandangan terhadap lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik melalui perspektif otonomi daerah dan pembangunan dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan." Buku ini membahas peran pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi mereka sendiri, menciptakan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebijakan di tingkat lokal.

Dengan merinci kontribusi masing-masing referensi, pemahaman tentang lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik dapat diperluas.

BAB 2

MENGANALISIS KEGAGALAN PASAR DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Analisis kegagalan pasar menyoroti ketidakmampuan pasar yang ideal, yang seharusnya mencakup informasi sempurna, persaingan ideal, dan minimnya eksternalitas, untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Kegagalan pasar dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk monopoli yang memungkinkan perusahaan menetapkan harga tinggi dan menghasilkan output yang kurang optimal, eksternalitas seperti dampak polusi yang tidak diperhitungkan oleh pasar, dan informasi asimetris yang dapat menghambat fungsi pasar.

Pemerintah memainkan peran kunci dalam merespons kegagalan pasar dengan menerapkan regulasi untuk mencegah monopoli dan melindungi konsumen, serta menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak efisien jika diandalkan pada sektor swasta. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan alat kebijakan seperti redistribusi pendapatan melalui pajak dan program transfer. Contoh konkret penerapan peran

pemerintah mencakup subsidi untuk mendorong produksi atau konsumsi tertentu, pengenaan pajak pada barang dengan eksternalitas negatif seperti polusi, dan kebijakan antimonopoli untuk mencegah dominasi pasar oleh satu perusahaan (Wasil, 2017).

Meskipun ada berbagai pandangan mengenai sejauh mana intervensi pemerintah seharusnya dilakukan dalam perekonomian, kesimpulannya adalah bahwa peran pemerintah yang efektif sangat penting untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan efisiensi dan keadilan dalam perekonomian.

2.1 Kelemahan Ekonomi Pasar

Berikut kami sertakan kelemahan ekonomi pasar beserta teoritisnya:

- 1 Pertimbangan Teoritis dalam Kekurangan Pasar (Hyman, 1999):

Dalam bukunya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mengidentifikasi kelemahan ekonomi pasar dari perspektif teoritis. Dia menyoroti kegagalan pasar, seperti informasi asimetris dan eksternalitas, sebagai faktor-faktor yang dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Referensi ini memberikan dasar teoritis untuk memahami keterbatasan ekonomi pasar dalam mencapai efisiensi.

2 Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya pada Ketidaksetaraan (Khusaini, 2006):

Dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah," Khusaini (2006) menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal dapat menyebabkan kelemahan dalam alokasi sumber daya. Ketidaksetaraan antar daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi lokal dapat muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi, menggambarkan kelemahan struktural dalam model ekonomi pasar.

3 Pertimbangan Etika dalam Kegagalan Pasar (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membahas kelemahan ekonomi pasar dari sudut pandang etika. Dia menyoroti bahwa pasar tidak selalu menghasilkan distribusi hasil yang adil, memperkenalkan pertimbangan etika dalam analisis kebijakan publik. Referensi ini memberikan dimensi baru dalam pemahaman kelemahan ekonomi pasar, melampaui aspek teknis.

4 Implikasi Kebijakan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah (Putra, 2018):

Windu Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" membahas kelemahan ekonomi pasar dengan fokus pada implikasi kebijakan dan tata kelola di tingkat daerah.

Analisisnya menunjukkan bahwa kelemahan ekonomi pasar dapat memerlukan intervensi pemerintah dan pengelolaan yang baik di tingkat lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Dengan merinci kelemahan ekonomi pasar melalui referensi ini, pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam sistem ekonomi pasar dapat diperluas.

2.2 Fungsi Campur Tangan Pemerintah

Berikut fungsi campur tangan pemerintah:

- 1 Pengelolaan Eksternalitas dan Pasar Tak Sempurna (Hyman, 1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) menjelaskan fungsi campur tangan pemerintah dalam mengatasi eksternalitas dan kegagalan pasar. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengelola dampak eksternal, seperti polusi, dan memperbaiki kegagalan pasar dengan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien.

- 2 Desentralisasi Fiskal dan Penyeimbangan Pembangunan (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" membahas campur tangan pemerintah melalui desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah

dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengelola pembangunan ekonomi lokal, memastikan penyeimbangan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.

3 Peran Pajak dan Transfer dalam Distribusi Kekayaan (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) menyoroti fungsi campur tangan pemerintah melalui instrumen pajak dan transfer dalam "*Public Finance and Public Policy*." Pemerintah dapat membentuk kebijakan redistribusi untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil melalui mekanisme pajak dan transfer.

4 Tata Kelola Keuangan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan (Putra, 2018):

Windu Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" memberikan wawasan tentang fungsi campur tangan pemerintah di tingkat daerah untuk pembangunan berkelanjutan. Analisisnya menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat memainkan peran kunci dalam mengelola kebijakan ekonomi lokal, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Dengan merinci fungsi campur tangan pemerintah melalui referensi ini, pemahaman tentang peran pemerintah dalam mengelola ekonomi publik dan mendukung pembangunan dapat diperluas.

2.3 Kurva Phillips

Kurva Phillips merupakan konsep kunci dalam ekonomi yang menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi dalam suatu perekonomian. Dalam bukunya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" (Hyman, 1999), Hyman menyajikan dasar teoritis tentang Kurva Phillips, menjelaskan bagaimana adanya hubungan yang umumnya bersifat invers antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Penjelasan ini memberikan landasan bagi pemahaman tentang bagaimana intervensi pemerintah dapat memengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi dalam suatu negara.

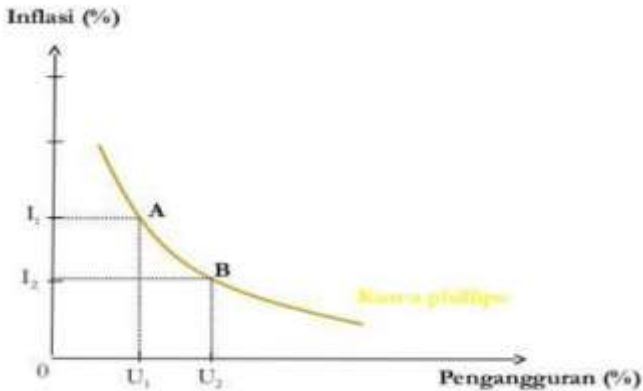
Seiring dengan perkembangan teori ekonomi, Jonathan Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" menyajikan implementasi Kurva Phillips dalam konteks kebijakan ekonomi modern. Gruber membahas cara pemerintah menggunakan pemahaman Kurva Phillips untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mengoptimalkan tingkat pengangguran dan inflasi. Analisis Gruber memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan konsep ini dalam kebijakan ekonomi aktual.

Namun, Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" memberikan pandangan kritis terhadap Kurva Phillips, menyoroti bahwa model ini mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Kuncoro menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekspektasi inflasi dan perubahan struktural dalam menganalisis hubungan antara pengangguran dan inflasi. Kritik ini memberikan gambaran lengkap tentang kompleksitas penerapan dan interpretasi Kurva Phillips dalam analisis ekonomi.

Pentingnya Kurva Phillips juga tercermin dalam analisis regional, seperti yang diuraikan oleh Windu Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah." Putra menunjukkan bagaimana ketidakpastian regional dan faktor-faktor daerah dapat mempengaruhi dinamika Kurva Phillips. Analisis ini memberikan konteks praktis dan implementatif, menyoroti bahwa penerapan Kurva Phillips harus mempertimbangkan variasi regional dan lokal dalam perekonomian suatu negara.

Tabel 1. Kurva Philip dalam tabel

Tingkat Pengangguran	Tingkat Inflasi
Tinggi	Rendah
Sedang	Sedang
Rendah	Tinggi



Gambar 1. Kurva Phillips

Penjelasan:

Kurva Phillips menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran (sumbu X) dan tingkat inflasi (sumbu Y).

Ketika tingkat pengangguran tinggi, tingkat inflasi rendah. Hal ini terjadi karena permintaan agregat (total permintaan barang dan jasa) rendah, sehingga produsen tidak memiliki insentif untuk menaikkan harga. Upah cenderung stabil atau turun, sehingga tekanan inflasi rendah.

Ketika tingkat pengangguran rendah, tingkat inflasi tinggi. Hal ini terjadi karena permintaan agregat tinggi, sehingga produsen menaikkan harga untuk memenuhi permintaan. Upah cenderung naik, sehingga biaya produksi meningkat dan mendorong inflasi.

Catatan:

Kurva Phillips hanya menunjukkan hubungan rata-rata antara pengangguran dan inflasi. Dalam kasus individual, hubungan antara pengangguran dan inflasi dapat berbeda. Kurva Phillips bergeser ke atas ketika terjadi kejutan ekonomi, seperti kenaikan harga minyak.

Kesimpulan:

Kurva Phillips adalah alat yang berguna untuk memahami hubungan antara pengangguran dan inflasi. Namun, penting untuk memahami keterbatasannya dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kedua indikator tersebut.

2.4 Hukum Wagner

1. Dasar Konseptual Hukum Wagner (Hyman, 1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) menguraikan dasar konseptual Hukum Wagner. Menurut Hukum Wagner, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap layanan publik dan intervensi pemerintah cenderung meningkat. Referensi ini membahas konsep bahwa dengan berkembangnya ekonomi, masyarakat mengharapkan lebih banyak dari pemerintah dalam hal penyediaan layanan dan perlindungan sosial.

2. Implementasi Hukum Wagner dalam Praktik (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membahas implementasi Hukum Wagner dalam praktik kebijakan ekonomi. Referensi ini memberikan contoh konkret bagaimana pemerintah merespons pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan anggaran untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Analisis Gruber memberikan wawasan tentang peran pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin besar seiring pertumbuhan ekonomi.

3. Kritik dan Perkembangan Hukum Wagner (Kuncoro, 2018): Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" memberikan perspektif kritis terhadap Hukum Wagner. Referensi ini membahas bahwa meskipun konsep Hukum Wagner berlaku dalam banyak kasus, terdapat kritik terhadap asumsi bahwa seluruh sektor publik akan selalu berkembang seiring pertumbuhan ekonomi. Penelitian lebih lanjut dan pemahaman konteks regional perlu diperhatikan untuk mengevaluasi sejauh mana Hukum Wagner berlaku dalam situasi tertentu.

Kesimpulannya, Hukum Wagner menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap layanan publik dan intervensi pemerintah cenderung meningkat. Implementasi Hukum Wagner dalam praktik kebijakan ekonomi menunjukkan bagaimana

pemerintah merespons pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, perspektif kritis menyoroti bahwa meskipun Hukum Wagner berlaku dalam banyak kasus, terdapat kritik terhadap asumsi bahwa seluruh sektor publik akan selalu berkembang seiring pertumbuhan ekonomi. Penelitian lebih lanjut serta pemahaman konteks regional diperlukan untuk mengevaluasi penerapan Hukum Wagner secara tepat dalam situasi tertentu (Nur'aini & Wasil, 2024).

2.5 Menganalisis Kegagalan Pasar

Kegagalan Pasar: Sebuah Analisis Mendalam

Circular ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pasar secara mendalam, dimulai dari konsep dasar, implikasinya dalam kebijakan publik, hingga tinjauan kritis terhadap pengembangan kebijakan (Wasil, 2017).

Konsep Kegagalan Pasar:

Menurut Hyman (1999), kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- a) Eksternalitas: Biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi pasar.

- b) Asimetri informasi: Ketidakseimbangan informasi antara pembeli dan penjual, yang dapat menyebabkan penipuan atau eksploitasi.
- c) Barang publik: Barang yang tidak dapat dipisahkan dan dikonsumsi secara bersama-sama, seperti pertahanan nasional.

Implikasi Kegagalan Pasar dalam Kebijakan Publik

Kegagalan pasar dapat mengakibatkan ketidakadilan dan inefisiensi dalam perekonomian. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui kebijakan publik, seperti:

- 1) Pajak: Dikenakan pada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif.
- 2) Subsidi: Diberikan untuk mendorong produksi atau konsumsi barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Regulasi: Diterapkan untuk mencegah monopoli dan melindungi konsumen dari informasi asimetris.

Gruber (2015) membahas bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih optimal.

Tinjauan Kritis terhadap Pengembangan Kebijakan:

Meskipun intervensi pemerintah dapat membantu mengatasi kegagalan pasar, namun terdapat tantangan dalam pengembangan kebijakan yang efektif. Kuncoro (2018) menekankan pentingnya evaluasi dampak kebijakan dan kewaspadaan terhadap potensi kegagalan kebijakan itu sendiri. Intervensi pemerintah yang berlebihan dapat menciptakan distorsi dan justru memperparah masalah.

Kesimpulan:

Analisis kegagalan pasar harus mempertimbangkan konsep dasar, implementasi dalam kebijakan publik, dan kritik terhadap pendekatan kebijakan. Dengan demikian, solusi yang dirumuskan dapat mengatasi kegagalan pasar secara efektif dan efisien.

2.6 Menganalisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian

1. Fondasi Teoritis Peran Pemerintah (Hyman, 1999):

Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Referensi ini menyajikan dasar teoritis tentang konsep campur tangan pemerintah, termasuk pembahasan

tentang peran dalam distribusi pendapatan, regulasi ekonomi, dan penyediaan barang publik.

2. Implikasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" membahas bagaimana peran pemerintah terkait dengan desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Referensi ini memberikan wawasan tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dan pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat lokal.

3. Kritik terhadap Peran Pemerintah dan Otonomi Daerah (Kuncoro, 2018):

Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" memberikan pandangan kritis terhadap peran pemerintah, khususnya terkait dengan otonomi daerah. Referensi ini membahas tantangan dan potensi distorsi yang dapat muncul akibat campur tangan pemerintah yang tidak tepat. Kritik konstruktif ini penting dalam merinci kompleksitas peran pemerintah dalam konteks perekonomian.

Dengan merinci peran pemerintah dari perspektif teoritis hingga implementasi kebijakan, analisis ini memberikan pemahaman

yang holistik tentang bagaimana pemerintah memainkan peran krusial dalam perekonomian.

2.7 Menganalisis Peranan Pemerintah dalam Perdagangan Internasional

Peran pemerintah dalam perdagangan internasional mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka akses ke produk dan layanan dari negara lain melalui perjanjian perdagangan bebas. Ini tidak hanya memberikan konsumen pilihan yang lebih banyak tetapi juga meningkatkan daya saing dan lapangan kerja dalam sektor ekspor dan impor. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional dengan menerapkan kebijakan proteksionis, seperti tarif dan kuota, untuk mendukung industri dalam negeri dan menjaga keamanan nasional (Wasil, 2017).

Dalam konteks global, pemerintah berperan sebagai anggota organisasi perdagangan internasional, seperti WTO, untuk menciptakan aturan perdagangan global dan menyelesaikan perselisihan dengan negara lain. Instrumen kebijakan yang digunakan termasuk tarif, kuota, subsidi, dan perjanjian perdagangan bebas. Sebagai contoh, Indonesia sebagai anggota WTO menerapkan kebijakan tarif dan kuota untuk melindungi industri dalam negeri, sementara pemberian subsidi kepada

eksportir bertujuan meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Kesimpulannya, pemerintah memegang peran sentral dalam mencapai tujuan perdagangan internasional, mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, perlindungan kepentingan nasional, dan menjaga harmoni dalam konteks global (Wasil, 2024).

2.8 Menganalisis Penyebab Gagalnya Peran Pemerintah dalam Perekonomian

1. Ketidakmampuan Implementasi Kebijakan (Hyman, 1999):
Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," salah satu penyebab kegagalan peran pemerintah dalam perekonomian adalah ketidakmampuan implementasi kebijakan dengan efektif. Referensi ini menyoroti pentingnya pelaksanaan kebijakan yang tepat waktu dan efisien agar dapat mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan, namun juga membahas kendala dan tantangan yang seringkali menghambat proses implementasi.
2. Faktor Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah (Khusaini, 2006; Kuncoro, 2018):
Khusaini (2006) dan Kuncoro (2018) membahas dampak dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terhadap peran pemerintah dalam perekonomian. Referensi ini mengidentifikasi bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang

tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah dan menurunkan efektivitas peran pemerintah pusat. Analisis Kuncoro juga menggambarkan bagaimana otonomi daerah yang tidak terkoordinasi dapat mengakibatkan kegagalan peran pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi nasional.

3. Keterbatasan Analisis dan Evaluasi Kebijakan (Gruber, 2015):

Gruber (2015) menyoroti peran penting analisis dan evaluasi kebijakan dalam mencegah kegagalan peran pemerintah. Referensi ini menjelaskan bahwa kurangnya analisis mendalam terhadap dampak kebijakan dan kurangnya evaluasi yang berkualitas dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, Gruber menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas analisis dan evaluasi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Dengan merujuk pada referensi-referensi ini, dapat dianalisis bahwa kegagalan peran pemerintah dalam perekonomian seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan implementasi kebijakan, dampak negatif dari desentralisasi fiskal, otonomi daerah yang tidak terkoordinasi, dan keterbatasan dalam analisis dan evaluasi kebijakan.

BAB 3

MENGANALISIS BARANG DAN JASA PUBLIK

Barang dan jasa publik merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat, ditandai dengan karakteristik non-eksklusivitas dan non-rivalitas. Ada dua jenis barang publik, yaitu barang publik murni seperti pertahanan nasional, yang memiliki kedua karakteristik, dan barang publik kuasi, seperti taman, yang memiliki satu dari dua karakteristik tersebut. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik karena kegagalan pasar, manfaat eksternal positif, dan tujuan redistribusi pendapatan (Wasil & Wahed, 2018).

Pembiayaan barang dan jasa publik dilakukan melalui pajak, pinjaman, dan penjualan aset. Evaluasi efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik menjadi penting, dengan pertimbangan apakah layanan tersebut disediakan dengan biaya terendah, mencapai tujuan yang diinginkan, dan didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Kesimpulannya, barang dan jasa publik memegang peran vital dalam kehidupan masyarakat, dengan pemerintah bertanggung jawab

untuk menyediakannya secara efisien, efektif, dan adil. (Awary et al., 2024)

3.1 Pengertian Barang dan Jasa Publik serta Barang dan Jasa Privat

1. Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" dan Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah," barang dan jasa publik merupakan entitas yang memberikan manfaat kepada masyarakat umum tanpa memandang siapa yang mengonsumsinya. Kedua referensi ini menjelaskan bahwa ciri khas barang publik melibatkan konsumsi bersama, di mana satu individu yang mengonsumsi tidak mengurangi manfaat yang dapat dinikmati oleh individu lain.
2. Perspektif Teori Ekonomi (Gruber, 2015; Kuncoro, 2018): Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dan Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" menyajikan perspektif teori ekonomi terkait pengertian barang dan jasa privat. Referensi ini menjelaskan bahwa barang dan jasa privat cenderung memiliki sifat rival (bersaing) dan eksklusif (dapat dikecualikan), di mana konsumsi oleh satu individu dapat mengurangi ketersediaan bagi individu lain dan dapat dikontrol oleh pemberi layanan.

3. Penerapan dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (Putra, 2018; Wahyuningsih, 2019):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dan Wahyuningsih (2019) dalam "Ekonomi Publik" membahas penerapan konsep barang dan jasa publik serta barang dan jasa privat dalam konteks tata kelola ekonomi daerah. Referensi ini menggambarkan bagaimana pemahaman tentang perbedaan karakteristik ini penting dalam mengembangkan kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. Tata kelola ekonomi

Karakteristik	Barang Privat	Barang Publik	Barang Campuran
Konsumsi	Rivalrous (konsumsi oleh satu orang mengurangi kesempatan orang lain)	Non-rivalrous (konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan orang lain)	Rivalrous atau non-rivalrous
Eksklusivitas	Excludable (dapat dibatasi penggunaannya)	Non-excludable (sulit atau tidak mungkin dibatasi penggunaannya)	Excludable atau non-excludable

Contoh	Makanan, pakaian, mobil	Pertahanan negara, penerangan jalan, taman kota	Siaran televisi, pendidikan, jalan tol
Penyediaan	Sektor swasta	Pemerintah	Sektor swasta dan/atau pemerintah
Pembiayaan	Harga	Pajak	Harga dan/atau pajak

3.2 Penentuan Jumlah Persediaan dan Harga Barang Publik dan Barang Privat

1. Strategi Penentuan Jumlah Persediaan (Hyman, 1999; Khusaini, 2006):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" dan Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" menguraikan strategi penentuan jumlah persediaan barang publik dan privat. Keduanya menyoroti bahwa penentuan jumlah persediaan barang publik sering melibatkan pertimbangan atas kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sementara untuk barang privat, perhitungan lebih berfokus pada kebutuhan dan permintaan individu.

2. Faktor Harga dan Ketersediaan (Gruber, 2015; Kuncoro, 2018):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dan Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" menyoroti faktor harga yang mempengaruhi penentuan jumlah persediaan barang publik dan privat. Referensi ini mencerminkan bahwa harga barang publik seringkali ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sementara harga barang privat lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar.

3. Dampak Kebijakan pada Tata Kelola Ekonomi Daerah (Putra, 2018; Wahyuningsih, 2019):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dan Wahyuningsih (2019) dalam "Ekonomi Publik" menggambarkan bagaimana kebijakan penentuan jumlah persediaan dan harga barang publik dan privat dapat berdampak pada tata kelola ekonomi daerah. Referensi ini menekankan pentingnya kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan ketersediaan barang yang diperlukan dalam konteks otonomi daerah.

Tabel 3. Tata Kelola Ekonomi Daerah

Kriteria	Barang Publik	Barang Privat
Jumlah Persediaan	- Identifikasi kebutuhan masyarakat - Analisis biaya-manfaat - Penentuan tingkat output	- Permintaan pasar - Biaya produksi - Penentuan tingkat output
Harga	- Pendanaan - Penentuan harga berdasarkan keadilan dan kemampuan masyarakat	- Struktur pasar - Kurva permintaan - Kurva biaya
Penentu	Pemerintah	Produsen
Mekanisme	Kebutuhan masyarakat dan kemampuan finansial	Permintaan pasar dan keuntungan

3.3 Menganalisis Pelayanan Publik

1. Kerangka Teoritis Pelayanan Publik (Hyman, 1999; Khusaini, 2006):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" dan Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" memberikan landasan teoritis untuk menganalisis pelayanan publik. Mereka membahas konsep dan teori yang mendasari penyediaan layanan oleh pemerintah,

mempertimbangkan aspek desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah sebagai faktor pengaruh.

2. Penerapan Kebijakan dalam Pelayanan Publik (Gruber, 2015; Kuncoro, 2018):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dan Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" menguraikan penerapan kebijakan dalam konteks pelayanan publik. Mereka menyoroti peran otonomi daerah, mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pelayanan masyarakat, dan memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi memengaruhi penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah.

3. Studi Empiris dan Konsep Analisis Pelayanan Publik (Mulyadi, 2018; Putra, 2018):

Mulyadi (2018) dalam "Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik" dan Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" membawa dimensi praktis dengan mendeskripsikan studi empiris dan konsep analisis pelayanan publik. Mereka memberikan contoh konkret dan aplikasi dari konsep-konsep teoritis yang dibahas sebelumnya, membantu pembaca memahami realitas pelayanan publik dalam konteks ekonomi daerah.

BAB 4

MENGANALISIS KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal memanfaatkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan negara (melalui pajak) untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Ini termasuk stabilisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi permintaan agregat, serta pajak yang memengaruhi pendapatan disposable dan konsumsi.

4.1 Memahami Sejarah Kebijakan Fiskal

1. Pendahuluan Sejarah Kebijakan Fiskal (Hyman, 1999):

Sejarah kebijakan fiskal dapat ditemukan dalam karya Hyman (1999) berjudul "Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy." Hyman membawa pembaca melalui perjalanan waktu, menguraikan peristiwa-peristiwa dan kebijakan fiskal kunci yang membentuk fondasi sistem keuangan publik. Analisisnya membantu memahami evolusi dan peran utama kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan ekonomi.

- 1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):
Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" menyajikan perspektif penting tentang bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi perkembangan kebijakan fiskal. Karya ini merinci peran daerah dalam mengelola anggaran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemahaman mendalam tentang desentralisasi fiskal membantu melihat sejarah kebijakan fiskal dengan nuansa yang lebih lokal.
- 2 Tantangan dan Perubahan Kontemporer (Gruber, 2015):
Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" memberikan wawasan terkini tentang tantangan dan perubahan dalam kebijakan fiskal. Analisisnya mencakup era kontemporer dan implikasinya terhadap kebijakan fiskal. Dengan memahami dinamika terkini, pembaca dapat mengidentifikasi bagaimana sejarah telah membentuk pandangan kebijakan fiskal saat ini.
- 3 Pengelolaan Ekonomi Daerah dan Kebijakan Fiskal Lokal (Putra, 2018):
Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" menyoroti dimensi lokal dan pengelolaan kebijakan fiskal daerah. Analisisnya menggambarkan sejarah kebijakan fiskal pada tingkat regional, membantu memahami bagaimana

kebijakan fiskal diterapkan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

4.2 Menjelaskan Ruang Lingkup dan Pengertian Kebijakan Fiskal

1. Pengantar Kebijakan Fiskal (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam karyanya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan pengantar yang kokoh tentang kebijakan fiskal. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal mencakup langkah-langkah pemerintah terkait pendapatan dan pengeluaran, terutama dalam pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi makro. Analisis Hyman memberikan landasan untuk memahami kompleksitas kebijakan fiskal dalam praktik.

2. Desentralisasi Fiskal dan Hubungannya dengan Kebijakan (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "*Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*" membahas peran desentralisasi fiskal dalam kerangka kebijakan. Melalui karyanya, Khusaini menjelaskan bagaimana alokasi keuangan yang didelegasikan ke daerah dapat memengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Hal ini memberikan gambaran

yang lebih spesifik tentang bagaimana kebijakan fiskal beroperasi dalam konteks desentralisasi.

3. Tren dan Inovasi dalam Kebijakan Fiskal (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dengan karyanya yang berjudul "*Public Finance and Public Policy*" membahas tren dan inovasi terbaru dalam kebijakan fiskal. Fokusnya mencakup evolusi kebijakan fiskal dalam konteks global dan cara-cara di mana negara-negara memodernisasi pendekatan mereka. Analisis Gruber membantu dalam memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat berkembang seiring waktu.

4. Implementasi Kebijakan Fiskal di Tingkat Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" membahas implementasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dengan memfokuskan pada tata kelola ekonomi daerah, Putra menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal dapat berbeda dalam konteks lokal. Analisis ini memberikan pandangan yang kaya tentang kompleksitas dan variasi kebijakan fiskal dalam skala yang lebih kecil.

4.3 Menjelaskan Tahapan dan Analisis Kebijakan Fiskal

1. Pendahuluan pada Kebijakan Fiskal (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan landasan kuat

untuk memahami pendahuluan kebijakan fiskal. Karya ini mengidentifikasi peran dan urgensi kebijakan fiskal dalam mendukung perekonomian. Dengan pendekatan teoritis dan aplikatif, Hyman memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar kebijakan fiskal.

2. Tahapan Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" merinci tahapan desentralisasi fiskal. Karya ini mengulas peran daerah dalam proses kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Dengan menggabungkan teori dan studi kasus, Khusaini membantu pembaca memahami langkah-langkah konkret dalam implementasi kebijakan fiskal.

3. Analisis Kebijakan Fiskal Kontemporer (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" memberikan perspektif tentang kebijakan fiskal kontemporer. Dengan menganalisis tren terkini dan perubahan dalam kebijakan fiskal, Gruber membawa pembaca ke dimensi dinamis kebijakan fiskal modern. Ini membantu dalam memahami bagaimana tahapan kebijakan fiskal dapat beradaptasi dengan perubahan dalam perekonomian global.

4. Tahapan Implementasi Kebijakan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" mengeksplorasi tahapan implementasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Fokusnya pada tata kelola ekonomi daerah memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan fiskal diimplementasikan dalam skala lokal. Dengan memadukan teori dan aplikasi praktis, Putra menggambarkan kompleksitas langkah-langkah implementasi.

4.4 Menganalisis Tujuan Kebijakan Fiskal

1. Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memaparkan tujuan utama kebijakan fiskal dalam mendukung perekonomian. Dengan menelaah konsep-konsep dasar teori kebijakan fiskal, karya ini menjelaskan bagaimana kebijakan ini dirancang untuk memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan stabilitas harga.

2. Tujuan Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) mengulas tujuan desentralisasi fiskal dan dampaknya pada pembangunan daerah. Menekankan aspek desentralisasi kebijakan fiskal, buku ini membahas

bagaimana tujuan-tujuan tersebut mengarah pada pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3. Perspektif Kontemporer Tujuan Kebijakan Fiskal (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membawa analisisnya tentang evolusi tujuan kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi modern. Karya ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana tujuan kebijakan fiskal berkembang untuk merespons dinamika ekonomi global dan isu-isu terkini.

4. Tujuan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Fiskal (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" menganalisis tujuan kebijakan fiskal dari perspektif otonomi daerah. Buku ini menyoroti tujuan kebijakan fiskal dalam memberdayakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ekonomi dan keuangan lokal.

4.5 Menganalisis Jenis Kebijakan Fiskal

1. Klasifikasi Kebijakan Fiskal (Hyman, 1999):

Dalam karyanya, "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999)

memberikan analisis mendalam tentang berbagai jenis kebijakan fiskal. Ia mengklasifikasikan kebijakan tersebut berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian, termasuk kebijakan pengeluaran dan kebijakan perpajakan. Analisisnya memberikan dasar pemahaman yang kokoh tentang cara pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi.

2. Perspektif Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" menggambarkan jenis-jenis kebijakan fiskal yang relevan dengan konteks desentralisasi. Analisisnya tidak hanya merinci kebijakan nasional tetapi juga menyoroti bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan dalam konteks otonomi daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal.

3. Pendekatan Modern terhadap Kebijakan Fiskal (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) membawa pembaca dalam pemahaman jenis kebijakan fiskal yang diterapkan dalam era modern. Dalam "*Public Finance and Public Policy*," Gruber menguraikan berbagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur ekonomi, seperti pengeluaran publik, perpajakan, dan transfer

pembayaran. Gruber menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi seperti stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan penyediaan barang publik. Dia juga membahas tantangan dan pertimbangan dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif, termasuk masalah defisit anggaran, pengelolaan utang publik, dan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui analisisnya, Gruber memberikan wawasan tentang pentingnya kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Kebijakan Fiskal dan Otonomi Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) menyajikan analisis tentang bagaimana jenis kebijakan fiskal berinteraksi dengan tata kelola ekonomi keuangan daerah. Dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah," ia menguraikan bagaimana kebijakan fiskal dapat membentuk kebijakan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.

BAB 5

MENGANALISIS KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH ERA OTONOMI DAERAH

Era otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar pada daerah untuk mengelola keuangannya, berdampak signifikan pada sistem keuangan negara dan keuangan daerah. Pendapatan negara, melalui sumber seperti pajak, bea cukai, dan sumber daya alam, serta belanja negara untuk sektor seperti pendidikan dan infrastruktur, mengalami perubahan seiring dengan pendapatan dan belanja daerah, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dari pemerintah pusat. Sistem keuangan daerah mengalami dampak otonomi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi, diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan, serta memungkinkan partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan daerah. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti ketimpangan fiskal antara daerah kaya dan miskin, kapasitas fiskal yang lemah, dan masih adanya masalah

korupsi, otonomi daerah memberikan landasan penting untuk perbaikan dan perubahan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Wasil & Wahed, 2018).

5.1 Menjelaskan Arti, Tujuan dan Fungsi APBN

Definisi dan Arti APBN (Hyman, 1999):

Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu rencana keuangan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu periode. Analisis Hyman memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana APBN menjadi instrumen sentral dalam pengelolaan keuangan negara, mencerminkan keseluruhan kebijakan fiskal.

Tujuan dan Fungsi APBN dalam Otonomi Daerah (Khusaini, 2006):

Dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah," Khusaini (2006) membahas tujuan dan fungsi APBN dalam konteks desentralisasi. Analisisnya mencakup bagaimana APBN dapat mendukung otonomi daerah dan memberikan dasar keuangan untuk pembangunan ekonomi regional.

Perspektif Modern terhadap APBN (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membawa perspektif modern tentang APBN. Ia membahas evolusi APBN dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer dan menjelaskan peran APBN dalam mencapai tujuan makroekonomi seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan.

APBN dan Tata Kelola Ekonomi Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) menyajikan pandangan tentang bagaimana APBN berperan dalam tata kelola ekonomi daerah. Dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah," ia membahas bagaimana kebijakan fiskal nasional yang tercermin dalam APBN dapat berdampak pada tata kelola ekonomi dan keuangan daerah.

5.2 Memahami Prinsip, Asas dan Landasan Hukum dan Cara Penyusunan APBN

Memahami Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum serta Cara Penyusunan APBN:

1. Prinsip dan Asas Penyusunan APBN (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menyajikan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penyusunan APBN. Analisisnya

membahas bagaimana prinsip efisiensi, keadilan, dan ekuitas diintegrasikan ke dalam perencanaan keuangan pemerintah, serta bagaimana aspek-aspek ini tercermin dalam pembentukan APBN.

2. Landasan Hukum Penyusunan APBN (Wahyuningsih, 2019):
Wahyuningsih (2019) dalam "Ekonomi Publik" mengulas landasan hukum yang mendasari penyusunan APBN. Pemahamannya mencakup aspek konstitusional dan regulasi hukum yang membentuk dasar otoritas pemerintah dalam menyusun dan menetapkan APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal.
3. Cara Penyusunan APBN dan Otonomi Daerah (Khusaini, 2006):
Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" menjelaskan cara penyusunan APBN dengan fokus pada dampak terhadap otonomi daerah. Analisisnya mencakup koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran yang mendukung pembangunan regional.
4. Perspektif Modern terhadap Penyusunan APBN (Gruber, 2015):
Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membawa perspektif modern terhadap proses penyusunan

APBN. Ia menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi dan data analytics memainkan peran penting dalam penyusunan anggaran, memungkinkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

5.3 Menganalisis Kebijakan APBN

1. Analisis Teoretis Kebijakan APBN (Hyman, 1999):

Dalam karyanya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) memberikan fondasi teoretis untuk menganalisis kebijakan APBN. Dia membahas konsep-konsep ekonomi publik yang mendasari pembentukan APBN, merinci bagaimana teori diimplementasikan dalam praktik kebijakan fiskal.

2. Kebijakan APBN dalam Perspektif Desentralisasi (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "*Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*" mengeksplorasi dampak kebijakan APBN terhadap desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Analisisnya menguraikan bagaimana kebijakan pusat mempengaruhi kebijakan daerah, dengan fokus pada alokasi sumber daya dan tanggung jawab fiskal.

3. Tantangan Kontemporer dalam Kebijakan APBN (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membahas tantangan kontemporer dalam merancang kebijakan APBN. Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi modern, analisisnya mengidentifikasi perubahan paradigma dan solusi inovatif yang diperlukan untuk menanggapi kompleksitas ekonomi saat ini.

4. Studi Kasus Kebijakan APBN Lokal (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" menyajikan studi kasus terkini terkait kebijakan APBN di tingkat daerah. Analisisnya memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pusat diimplementasikan dan direspon oleh pemerintah daerah, dengan fokus pada tata kelola keuangan daerah.

5.4 Menganalisis Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

1. Teori Pengelolaan Keuangan Publik (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menyajikan teori pengelolaan keuangan publik yang membentuk dasar kebijakan fiskal. Analisisnya mencakup konsep-konsep utama dalam pengelolaan keuangan negara, membantu

memahami peran dan kekuasaan yang terlibat dalam menyusun dan menjalankan kebijakan keuangan.

2. Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Analisisnya mengidentifikasi dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pengelolaan keuangan, memberikan wawasan mendalam tentang hubungan fiskal di tingkat lokal.

3. Tantangan Kontemporer dalam Pengelolaan Keuangan Publik (Gruber, 2015):

Gruber (2015) membahas tantangan kontemporer dalam pengelolaan keuangan publik di era globalisasi. Dengan fokus pada dinamika kebijakan fiskal internasional, analisisnya mengeksplorasi kompleksitas kekuasaan dalam menghadapi isu-isu seperti ketidakpastian ekonomi global dan krisis keuangan.

4. Studi Kasus Tata Kelola Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" menyajikan studi kasus terkait tata kelola keuangan daerah dan bagaimana kekuasaan diterapkan dalam konteks ini. Melalui analisisnya, pembaca dapat memahami

bagaimana pengelolaan keuangan negara dieksekusi di tingkat daerah dan peran kekuasaan dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.

5.5 Menganalisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara

1. Konsep Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Publik (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance*" membahas konsep dasar pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik. Analisisnya menguraikan peran lembaga pengawas, mekanisme kontrol, dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal. Pengawasan dianggap sebagai elemen krusial dalam memitigasi risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Pengawasan Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) mendalam tentang pengawasan terhadap desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Analisisnya mencakup peran lembaga pengawas di tingkat lokal, menyoroti tantangan dan peluang dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah.

3. Aspek Kebijakan Publik dan Pengawasannya (Gruber, 2015):

Gruber (2015) membahas bagaimana aspek kebijakan publik tercermin dalam mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan negara. Fokus analisisnya melibatkan peran lembaga pengawas dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal mencapai tujuannya dan memenuhi standar akuntabilitas.

4. Studi Kasus Tata Kelola Keuangan Daerah (Putra, 2018):
Putra (2018) menyajikan studi kasus terkait tata kelola keuangan daerah dan upaya pengawasan yang diterapkan. Analisisnya memberikan gambaran praktis tentang bagaimana lembaga pengawas berperan dalam memastikan integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

5.6 Memahami Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Konsep Dasar Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Publik (Hyman, 1999):
Hyman (1999) membahas konsep dasar kekuasaan dalam pengelolaan keuangan publik, mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang membentuk dinamika di tingkat daerah. Analisisnya merinci hubungan antara otonomi daerah dan

kekuasaan dalam konteks kebijakan fiskal, memberikan landasan teoritis untuk pemahaman peran keuangan daerah.

2. Desentralisasi Fiskal dan Pengembangan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) mengeksplorasi konsep desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pengembangan daerah. Analisisnya mencakup peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan keuangan di tingkat lokal, memperkaya pemahaman tentang bagaimana daerah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya dan kebijakan keuangannya.

3. Pengelolaan Keuangan dalam Konteks Otonomi Daerah (Gruber, 2015):

Gruber (2015) membahas dinamika kekuasaan dalam konteks otonomi daerah, menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan menjadi jantung dari kebijakan publik di tingkat lokal. Analisisnya mencakup interaksi antara pemerintah daerah, kebijakan fiskal, dan kekuasaan pengelolaan keuangan dalam membentuk pembangunan daerah.

4. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) menyajikan perspektif tentang tata kelola ekonomi keuangan daerah, membahas struktur kekuasaan

dalam mengelola aspek-aspek keuangan lokal. Analisisnya melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan diatur dan diimplementasikan dalam rangkaian kebijakan keuangan daerah.

5.7 Memahami Asas Umum dan Struktur APBD

1. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (Hyman, 1999):
Hyman (1999) membahas asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai landasan teoritis dalam menyusun APBD. Analisisnya merinci prinsip-prinsip yang menjadi dasar kebijakan keuangan daerah, memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana asas-asas ini membentuk struktur dan alokasi anggaran.
2. Desentralisasi Fiskal dan Struktur APBD (Khusaini, 2006):
Khusaini (2006) mengeksplorasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan struktur APBD, menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal di tingkat daerah tercermin dalam penyusunan anggaran. Analisisnya melibatkan pemahaman terhadap pengaruh desentralisasi terhadap struktur pendapatan dan belanja dalam APBD.
3. Dinamika APBD dalam Kebijakan Fiskal (Gruber, 2015):
Gruber (2015) menggambarkan dinamika APBD dalam konteks kebijakan fiskal, menyoroti peran APBD sebagai

instrumen utama pemerintah daerah dalam mencapai tujuan ekonomi. Analisisnya memberikan wawasan tentang bagaimana struktur APBD mencerminkan prioritas kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

4. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) menyajikan perspektif tentang tata kelola ekonomi keuangan daerah, memandang struktur APBD sebagai elemen kunci dalam pengelolaan keuangan lokal. Analisisnya melibatkan pemahaman terhadap bagaimana asas-asas umum diimplementasikan melalui struktur APBD, menciptakan keterkaitan yang kuat antara prinsip-prinsip teoritis dan praktik pengelolaan keuangan daerah.

5.8 Menganalisis Tahap-tahap Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Penentuan Strategi dan Prioritas APBD

1. Keterkaitan Arah Kebijakan Umum dengan Teori Kebijakan Publik (Hyman, 1999):

Hyman (1999) memberikan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara tahap penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dengan teori kebijakan publik. Analisisnya mencerminkan cara teori kebijakan dapat membentuk

landasan untuk penetapan arah dan kebijakan umum yang mengarah pada penyusunan APBD yang efektif.

2. **Desentralisasi Fiskal dan Strategi APBD (Khusaini, 2006):**
Khusaini (2006) menguraikan dampak desentralisasi fiskal pada tahap penetapan strategi dan prioritas APBD. Analisisnya membahas bagaimana kebijakan fiskal di tingkat daerah mempengaruhi pemilihan strategi dan prioritas dalam penyusunan APBD, menciptakan konteks penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi lokal.
3. **Dinamika Kebijakan Publik dalam Penyusunan APBD (Gruber, 2015):**
Gruber (2015) menganalisis dinamika kebijakan publik yang memengaruhi tahap penyusunan APBD, dengan fokus pada peran strategi dan prioritas. Analisisnya memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor kebijakan, seperti tekanan politik dan tuntutan masyarakat, dapat membentuk strategi dan prioritas APBD.
4. **Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah dan Kebijakan APBD (Putra, 2018):**
Putra (2018) menyoroti peran tata kelola ekonomi keuangan daerah dalam membimbing proses penetapan strategi dan prioritas APBD. Analisisnya melibatkan konsep-

konsep dari teori ekonomi keuangan daerah untuk menjelaskan bagaimana tahap-tahap ini menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi regional.

Tabel 4. Tabel teori yang relevan kebijakan umum APBD

Teori	Penjelasan	Keterkaitan dengan Tahap Penyusunan APBD
Teori Kebijakan Publik (Hyman, 1999)	Memberikan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan publik, termasuk bagaimana tujuan ditetapkan, opsi diidentifikasi, dan solusi dipilih.	Membantu dalam menentukan arah dan kebijakan umum APBD yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Desentralisasi Fiskal dan Strategi APBD (Khusaini, 2006)	Menganalisis dampak desentralisasi fiskal pada strategi dan prioritas APBD.	Memperjelas bagaimana kebijakan fiskal di tingkat daerah mempengaruhi strategi dan prioritas dalam penyusunan APBD.

Teori	Penjelasan	Keterkaitan dengan Tahap Penyusunan APBD
Dinamika Kebijakan Publik dalam Penyusunan APBD (Gruber, 2015)	Menganalisis dinamika kebijakan publik yang memengaruhi strategi dan prioritas APBD.	Memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor politik dan tuntutan masyarakat dapat membentuk strategi dan prioritas APBD.
Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah dan Kebijakan APBD (Putra, 2018)	Menjelaskan peran tata kelola ekonomi keuangan daerah dalam proses penetapan strategi dan prioritas APBD.	Membantu dalam memastikan bahwa strategi dan prioritas APBD selaras dengan tujuan tata kelola ekonomi keuangan daerah.

BAB 6

MENGANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DALAM PEREKONOMIAN

Pajak memiliki peran integral dalam perekonomian, menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar, memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik lebih banyak, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pajak memainkan peran dalam distribusi pendapatan dengan penerapan sistem pajak progresif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendukung program-program sosial bagi masyarakat miskin.

Pajak juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, digunakan untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan pajak saat diperlukan, atau merangsang pertumbuhan ekonomi dengan penurunan pajak saat terjadi resesi. Selain fungsi-fungsi tersebut, pajak juga dapat digunakan untuk mendorong efisiensi ekonomi, seperti mengurangi konsumsi barang berbahaya atau memberikan

insentif kepada perusahaan yang berinovasi. Analisis kontribusi pajak dapat dilakukan melalui metode statistik, model ekonomi, dan studi kasus untuk memahami hubungannya dengan indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Dengan sistem pajak yang adil dan transparan, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

6.1 Memahami Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Teori Penerimaan Menurut Hyman (1999):

Menurut Hyman (1999), penerimaan pemerintah merupakan aspek penting dalam kebijakan fiskal. Dalam teorinya, Hyman membahas berbagai aplikasi teori dalam konteks kebijakan publik yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Konsep ini membantu pemahaman tentang cara penerimaan pemerintah pusat dan daerah dapat dibentuk melalui kerangka teoritis yang kokoh.

2. Desentralisasi Fiskal dan Penerimaan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) membahas dampak desentralisasi fiskal terhadap penerimaan daerah. Analisisnya menguraikan

perubahan dinamika penerimaan daerah sebagai hasil dari desentralisasi fiskal, memberikan perspektif yang penting untuk memahami peran penerimaan dalam konteks otonomi daerah.

3. Kebijakan Penerimaan dalam Perspektif Gruber (2015):
Dalam perspektif Gruber (2015), kebijakan penerimaan pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama. Gruber menganalisis berbagai strategi dan kebijakan penerimaan yang dapat diadopsi untuk mendukung keberlanjutan fiskal. Ini memberikan pandangan tentang cara merancang sistem penerimaan yang efektif.
4. Implikasi Penerimaan terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah (Putra, 2018):
Putra (2018) menyoroti implikasi penerimaan terhadap tata kelola keuangan daerah. Analisisnya membahas bagaimana tingkat penerimaan mempengaruhi kebijakan dan praktik tata kelola keuangan daerah. Pemahaman ini penting dalam merancang kebijakan yang mempromosikan efisiensi dan efektivitas penerimaan pemerintah daerah.

6.2 Menganalisis Potensi Penerimaan/ Pendapatan Daerah

1. Teori Potensi Penerimaan Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) memberikan landasan teoritis dalam menganalisis potensi penerimaan daerah. Dalam karyanya, ia menguraikan konsep potensi penerimaan sebagai aplikasi teori kebijakan fiskal dalam konteks daerah. Penelusuran konsep ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang cara mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi penerimaan yang ada.

2. Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) mengulas dampak desentralisasi fiskal terhadap pendapatan daerah. Analisisnya membantu memahami bagaimana sistem fiskal yang terdesentralisasi dapat memengaruhi potensi pendapatan daerah. Pemahaman ini relevan untuk merancang kebijakan yang meningkatkan potensi pendapatan di tingkat lokal.

3. Strategi Peningkatan Pendapatan Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) membahas strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam konteks kebijakan fiskal. Analisisnya mencakup berbagai opsi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan potensi penerimaan. Ini memberikan pandangan tentang cara merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

4. Pendapatan dan Kemandirian Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) menganalisis hubungan antara pendapatan dan kemandirian daerah. Pemahaman mengenai potensi penerimaan dan pengelolaan pendapatan menjadi kunci dalam memahami sejauh mana daerah dapat mandiri secara finansial. Analisis ini penting untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan mereka.

6.3 Menganalisis Penghitungan Potensi Pendapatan Basis Mikro

Metode Penghitungan Potensi Pendapatan Menurut Hyman (1999):

Dalam karyanya, Hyman (1999) memberikan wawasan mengenai metode penghitungan potensi pendapatan basis mikro. Ia membahas aplikasi teori kebijakan fiskal dalam mengidentifikasi dan mengukur potensi pendapatan di tingkat mikroekonomi. Penelusuran metode ini dapat memberikan landasan konseptual yang kokoh untuk menghitung potensi pendapatan dari aspek mikroekonomi.

Desentralisasi Fiskal dan Basis Mikro (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) mengaitkan desentralisasi fiskal dengan penghitungan potensi pendapatan pada level mikro. Analisisnya

membahas bagaimana desentralisasi dapat memengaruhi basis mikroekonomi dalam menghasilkan pendapatan. Pemahaman ini penting untuk merancang strategi penghitungan potensi pendapatan yang memperhatikan dinamika daerah secara spesifik.

Pendekatan Analitis Gruber (2015) terhadap Basis Mikro:

Gruber (2015) menyajikan pendekatan analitis terhadap penghitungan potensi pendapatan basis mikro. Dalam kajiannya, ia membahas kerangka kerja analitis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisis potensi pendapatan pada tingkat mikroekonomi. Analisis ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang dapat diperhitungkan dalam mengukur potensi pendapatan.

Studi Kasus Putra (2018) tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah:

Putra (2018) memberikan studi kasus tentang tata kelola ekonomi daerah dan penghitungan potensi pendapatan basis mikro. Melalui analisisnya, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor tertentu dalam tata kelola ekonomi daerah berkontribusi pada potensi pendapatan di tingkat mikro. Studi kasus ini dapat memberikan gambaran konkret tentang implementasi penghitungan potensi pendapatan.

Tabel 5. Potensi Pendapatan Basis Mikro

Metode	Penjelasan	Keunggulan	Kelemahan
Hyman (1999)	Menerapkan teori kebijakan fiskal untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi pendapatan di tingkat mikroekonomi.	Memberikan landasan konseptual yang kokoh.	Mungkin terlalu teoretis dan sulit diterapkan secara praktis.
Khusaini (2006)	Menghubungkan desentralisasi fiskal dengan penghitungan potensi pendapatan pada level mikro.	Memperhatikan dinamika daerah secara spesifik.	Mungkin kurang mendalam dalam analisis potensi pendapatan.
Gruber (2015)	Menyajikan pendekatan analitis untuk mengukur dan	Memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang faktor-	Mungkin memerlukan data dan sumber daya yang lebih banyak.

Metode	Penjelasan	Keunggulan	Kelemahan
	menganalisis potensi pendapatan basis mikro.	faktor yang dapat diperhitungkan.	
Putra (2018)	Memberikan studi kasus tentang tata kelola ekonomi daerah dan penghitungan potensi pendapatan basis mikro.	Memberikan gambaran konkret tentang implementasi penghitungan potensi pendapatan.	Mungkin hanya fokus pada satu daerah dan tidak dapat digeneralisasikan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Potensi Pendapatan Pajak (Karenina, Andayani, Aditya, & Wasil, 2021):

1. Tarif Pajak: Semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi potensi pendapatan pajak.
2. Dasar Pengenaan Pajak: Semakin tinggi dasar pengenaan pajak, semakin tinggi potensi pendapatan pajak.

3. **Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan potensi pendapatan pajak.
4. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak, seperti insentif pajak dan amnesti pajak, dapat mempengaruhi potensi pendapatan pajak.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak:** Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi potensi pendapatan pajak.

BAB 7

MENGANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM PEREKONOMIAN

Pajak dan retribusi memiliki peran signifikan dalam perekonomian, memberikan kontribusi dalam berbagai aspek. Pajak, sebagai sumber utama pendapatan negara, mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara merata melalui pendekatan progresif, membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Pajak juga menjadi alat stabilisasi ekonomi, di mana dapat digunakan untuk mengatasi inflasi dengan meningkatkan pajak atau merespons resesi dengan menurunkan pajak.

Di sisi lain, retribusi memberikan pendanaan untuk layanan publik seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan, dan penerangan jalan. Dengan membayar retribusi, masyarakat lebih menghargai dan menjaga layanan publik, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Retribusi juga dapat menciptakan

keadilan, karena masyarakat yang lebih banyak menggunakan layanan publik akan membayar lebih banyak. Keseluruhan, pajak dan retribusi tidak hanya berperan sebagai pendapatan negara, tetapi juga memengaruhi distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, efisiensi ekonomi, dan keadilan dalam konteks perekonomian (Karenina, Andayani, Aditya, & Wasil, 2021).

7.1 Sejarah Perkembangan Pajak

1. Perkembangan Awal Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) menguraikan sejarah awal perkembangan pajak dalam karya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*." Dia merinci peran pajak dalam mendukung pembangunan masyarakat dan menciptakan pendapatan untuk pembiayaan kebijakan publik. Dengan merunut sejarah ini, kita dapat memahami perubahan dan evolusi konsep pajak dari masa ke masa.

2. Konteks Desentralisasi Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" memberikan perspektif sejarah perkembangan pajak dalam konteks desentralisasi fiskal. Bagaimana pajak berkembang seiring dengan pergeseran kebijakan fiskal dan desentralisasi menjadi pokok bahasan penting dalam merunut sejarah ini.

3. Pengaruh Kebijakan Publik Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mengeksplorasi dampak kebijakan publik terhadap sejarah perkembangan pajak. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah membentuk struktur pajak saat ini merupakan fokus analisisnya. Pemahaman ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika antara kebijakan publik dan perkembangan sistem pajak.

4. Tata Kelola Ekonomi Daerah oleh Putra (2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" membahas sejarah perkembangan pajak dari perspektif tata kelola ekonomi daerah. Studi kasus ini mencakup bagaimana pajak menjadi instrumen penting dalam mendukung otonomi daerah dan keuangan daerah secara keseluruhan. Pemahaman tentang peran pajak dalam tata kelola ekonomi daerah dapat memberikan gambaran holistik terhadap sejarah perkembangan pajak di tingkat lokal.

7.2 Pengertian dan Prinsip Pengenaan Pajak

1. Definisi Menurut Hyman (1999):

Menurut Hyman (1999) dalam karya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan oleh

pemerintah kepada individu dan perusahaan untuk mendanai kegiatan publik. Dalam perspektif ini, pajak menjadi instrumen penting dalam mengumpulkan dana untuk membiayai berbagai program dan layanan publik.

2. Prinsip Pengenaan Pajak Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" membahas prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak. Prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum menjadi fokus utama. Analisis Khusaini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk dasar pengenaan pajak yang efektif.

3. Perspektif Gruber (2015) tentang Pengenaan Pajak:

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membawa pemahaman tentang bagaimana pengenaan pajak terkait dengan kebijakan fiskal dan tujuan ekonomi makro. Analisisnya melibatkan peran pajak dalam merespons perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

4. Aspek Hukum Menurut Wahyuningsih (2019):

Wahyuningsih (2019) dalam "Ekonomi Publik" menyoroiti aspek hukum dalam pengenaan pajak. Perspektif ini mencakup legalitas dan keabsahan pajak serta perlindungan

hak-hak kontributor. Pemahaman aspek hukum ini dapat memberikan wawasan tentang perlunya kepastian hukum dalam sistem pajak.

Tabel ini hanya menunjukkan beberapa contoh definisi dan prinsip pengenaan pajak.

Tabel 6. Definisi dan pengenaan pajak langsung

Sumber	Definisi Pajak	Prinsip Pengenaan Pajak	Fokus
Hyman (1999)	Kontribusi wajib untuk mendanai kegiatan publik	-	Instrumen pendanaan
Khusaini (2006)	-	Keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum	Dasar pengenaan pajak
Gruber (2015)	-	Peran pajak dalam kebijakan fiskal dan tujuan ekonomi makro	Kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi

Sumber	Definisi Pajak	Prinsip Pengenaan Pajak	Fokus
Wahyuningsih (2019)	-	Legalitas, keabsahan, dan perlindungan hak-hak kontributor	Aspek hukum dan kepastian hukum
Musgrave & Peacock (1967)	Pembayaran wajib oleh individu dan badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang sepadan	-	Karakteristik pajak
Bird & Oldman (2015)	Pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan Undang-Undang	Manfaat dan kemampuan membayar	Distribusi pendapatan dan keadilan

Sumber	Definisi Pajak	Prinsip Pengenaan Pajak	Fokus
OECD (2018)	Transfer wajib dari sektor swasta ke sektor publik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah	Efisiensi, kesederhanaan, dan keadilan	Desain sistem pajak

Masih banyak sumber lain yang dapat dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pajak.

Penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif saat menganalisis dan mengevaluasi sistem pajak.

7.3 Pajak langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pengertian Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy" menjelaskan bahwa pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada individu atau perusahaan, seperti pajak pendapatan. Di sisi lain, pajak tidak langsung melibatkan perantara dalam pemungutannya, seperti

pajak penjualan. Analisis ini membantu memahami perbedaan dalam cara pemungutan dan dampaknya terhadap kontributor.

Khusaini tentang Efisiensi Pajak (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" mendiskusikan efisiensi dari dua jenis pajak. Pajak langsung sering dianggap lebih efisien karena tidak melibatkan perantara dan dapat diarahkan secara langsung pada individu dengan kemampuan membayar yang lebih tinggi. Pemahaman ini membantu menganalisis bagaimana pilihan antara pajak langsung dan tidak langsung memengaruhi alokasi sumber daya.

Perspektif Gruber (2015) tentang Pajak Tidak Langsung:

Dalam "*Public Finance and Public Policy*," Gruber (2015) membahas pajak tidak langsung dan dampaknya pada perilaku konsumen. Analisisnya menyoroti bagaimana penyesuaian harga dan elastisitas permintaan dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kebijakan ekonomi. Pemahaman ini penting dalam merancang kebijakan pajak yang memadai.

Aspek Ekonomi Lokal Menurut Putra (2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" membahas implementasi pajak langsung dan tidak langsung di tingkat daerah. Analisisnya mencakup dampak kebijakan fiskal lokal

pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan daerah. Melalui perspektif ini, kita dapat memahami bagaimana pilihan antara dua jenis pajak dapat memengaruhi dinamika ekonomi di tingkat lokal.

Tabel 7. Definisi dan pengenaan pajak tidak langsung

Sumber	Definisi Pajak Langsung	Definisi Pajak Tidak Langsung	Fokus
Hyman (1999)	Dikenakan langsung pada individu/perusahaan (contoh: pajak pendapatan)	Melibatkan perantara dalam pemungutannya (contoh: pajak penjualan)	Perbedaan pemungutan dan dampak pada kontributor
Khusaini (2006)	Lebih efisien karena tidak melibatkan perantara dan diarahkan pada individu dengan kemampuan membayar tinggi	-	Efisiensi dan alokasi sumber daya
Gruber (2015)	-	Dampak pada perilaku konsumen,	Dampak pada perilaku konsumen

Sumber	Definisi Pajak Langsung	Definisi Pajak Tidak Langsung	Fokus
		penyesuaian harga, dan elastisitas permintaan	dan kebijakan ekonomi
Putra (2018)	-	Implementasi di tingkat daerah, dampak kebijakan fiskal lokal pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan daerah	Dinamika ekonomi di tingkat lokal

7.4 Menjelaskan Tarif Pajak

Perspektif Hyman (1999) tentang Konsep Tarif Pajak:

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan pemahaman konsep tarif pajak, menyoroti peran tarif dalam menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Analisis

ini penting untuk memahami dasar perhitungan pajak dan dampaknya pada keadilan fiskal.

Khusaini (2006) dan Penyesuaian Tarif di Ekonomi Publik:

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas bagaimana tarif pajak dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Analisisnya membantu menjelaskan konsep tarif yang dinamis, yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kebijakan daerah.

Keterkaitan Tarif Menurut Gruber (2015) dengan Kebijakan Publik:

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mengaitkan tarif pajak dengan kebijakan publik. Penjelasannya mencakup bagaimana tarif dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi atau mengurangi ketidaksetaraan. Memahami keterkaitan ini membantu melihat lebih dari sekadar aspek pemungutan pajak.

Pandangan Mulyadi (2018) tentang Tarif dan Kebijakan Publik Lokal:

Mulyadi (2018) dalam "Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik" membahas implementasi tarif pajak dalam konteks kebijakan publik lokal. Analisisnya membantu menjelaskan bagaimana tarif pajak dapat menjadi instrumen penting dalam

menentukan pendapatan daerah dan membiayai proyek-proyek pembangunan.

7.5 Menganalisis Pengaruh Pengenaan Pajak terhadap Perilaku Ekonomi

Pendekatan Teoritis Hyman (1999) terhadap Pengaruh Pajak:

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menyajikan dasar teoritis tentang pengaruh pajak terhadap perilaku ekonomi. Dalam karyanya, ia membahas konsep elastisitas pajak dan bagaimana perubahan tarif dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen. Analisis ini membantu memahami keterkaitan antara kebijakan pajak dan dinamika ekonomi.

Perspektif Khusaini (2006) tentang Desentralisasi Fiskal:

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas pengenaan pajak dalam konteks desentralisasi fiskal. Analisisnya mencakup dampak kebijakan pajak terhadap pembangunan daerah dan perilaku ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan ini memperluas pandangan kita untuk mempertimbangkan aspek regional dalam analisis pengaruh pajak.

Kontribusi Gruber (2015) terhadap Kebijakan Publik:

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" menyetujui perspektif kebijakan publik terkait pengenaan pajak. Ia menguraikan bagaimana pilihan desain pajak dapat membentuk perilaku ekonomi secara makro dan mikro. Analisis Gruber membantu menghubungkan aspek kebijakan publik dengan respons ekonomi yang mungkin muncul dari berbagai pengaturan pajak.

Relevansi Analisis Mulyadi (2018) untuk Pelayanan Publik:

Mulyadi (2018) dalam "Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik" menyoroti konsep analisis bukti dalam konteks pelayanan publik. Meskipun fokusnya bukan hanya pada pengaruh pajak, pendekatannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemahaman empiris dapat memperkaya analisis dampak pengenaan pajak terhadap perilaku ekonomi.

7.6 Menganalisis Faktor Penentu Penerimaan Perpajakan

Teori Hyman tentang Faktor Penerimaan Pajak (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) memberikan landasan teoritis terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan perpajakan. Ia menjelaskan konsep elastisitas pajak dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi seberapa efektif suatu sistem

perpajakan dalam mengumpulkan pendapatan. Analisis ini memberikan dasar untuk memahami kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam penerimaan perpajakan.

Perspektif Khusaini tentang Desentralisasi Fiskal (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" menyelidiki bagaimana desentralisasi fiskal dapat memengaruhi penerimaan perpajakan di tingkat daerah. Analisisnya merinci dampak desentralisasi terhadap kebijakan pajak lokal dan kontribusinya terhadap pendapatan pemerintah daerah. Perspektif ini menggambarkan pentingnya mempertimbangkan konteks regional dalam menganalisis faktor penerimaan perpajakan.

Kebijakan Pajak Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membahas berbagai kebijakan pajak dan bagaimana desain sistem perpajakan dapat memengaruhi penerimaan. Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang adil dan efisien serta dampaknya terhadap respons ekonomi. Analisis Gruber dapat membantu menganalisis faktor kebijakan yang mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Kontribusi Kuncoro tentang Otonomi Daerah (2018):

Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" membahas hubungan antara otonomi daerah dan penerimaan perpajakan. Analisisnya merinci bagaimana pemberian wewenang kepada daerah dalam mengelola pajak dapat memengaruhi penerimaan secara keseluruhan. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor kebijakan dan institusional yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan.

7.7 Menganalisis Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Perspektif Teoritis Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menyajikan perspektif teoritis terkait kebijakan pengampunan pajak. Ia dapat memberikan pemahaman tentang landasan teoritis di balik kebijakan ini, termasuk potensi dampaknya terhadap penerimaan negara. Analisis ini melibatkan konsep elastisitas pajak dan teori kebijakan fiskal yang relevan.

Desentralisasi Fiskal Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan pengampunan pajak dapat berinteraksi dengan desentralisasi fiskal. Analisis ini dapat

membantu memahami implikasi kebijakan ini pada tingkat daerah dan bagaimana dampaknya memengaruhi penerimaan daerah.

Aspek Kebijakan Pajak Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dapat memberikan wawasan tentang aspek kebijakan pajak yang terkait dengan kebijakan pengampunan pajak. Faktor seperti keadilan, efisiensi, dan dampaknya terhadap perilaku ekonomi dapat dianalisis dari sudut pandang kebijakan fiskal.

Pandangan Otonomi Daerah oleh Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" menyediakan perspektif tentang bagaimana kebijakan pengampunan pajak dapat berintegrasi dengan konsep otonomi daerah. Analisis ini dapat menggambarkan bagaimana daerah dapat bersinergi dengan kebijakan pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah.

7.8 Menganalisis Tolak Ukur Kinerja Penerimaan Perpajakan Suatu Daerah

Landasan Teoritis dari Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan dasar teoritis terkait tolak ukur

kinerja penerimaan perpajakan. Penelusuran konsep-konsep teoritis seperti efisiensi dan elastisitas pajak dapat memberikan landasan untuk memahami kriteria kinerja dalam konteks penerimaan perpajakan daerah.

Perspektif Desentralisasi Fiskal Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" dapat memberikan pandangan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tolak ukur kinerja penerimaan perpajakan suatu daerah. Analisis ini memperhitungkan sejauh mana desentralisasi dapat memberikan keleluasaan dan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Aspek Kebijakan Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dapat membantu menganalisis tolak ukur kinerja penerimaan perpajakan dengan mempertimbangkan aspek kebijakan pajak. Faktor seperti keadilan, kepastian hukum, dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi lokal menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja penerimaan pajak.

Keterkaitan dengan Otonomi Daerah Menurut Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" menyajikan pandangan tentang bagaimana tolak ukur kinerja penerimaan perpajakan berkaitan dengan otonomi daerah. Analisis

ini dapat mengidentifikasi sejauh mana suatu daerah dapat mengoptimalkan kemandirian kebijakan perpajakan sebagai bagian dari otonomi daerah.

7.9 Menganalisis Pajak Daerah, Jenis Pajak Daerah

Pendekatan Teoritis dari Hyman (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) memberikan pemahaman teoritis tentang jenis pajak dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Teori ini membantu menganalisis hubungan antara jenis pajak daerah dengan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan suatu daerah.

Desentralisasi Fiskal Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" memberikan perspektif desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan jenis pajak daerah. Analisis Khusaini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana desentralisasi dapat memengaruhi kebijakan perpajakan daerah, termasuk jenis pajak yang dapat diterapkan.

Kebijakan Pajak Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" membahas kebijakan perpajakan dan dampaknya pada kebijakan publik. Analisis Gruber dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemilihan

jenis pajak daerah dapat mencerminkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu daerah.

Kaitan dengan Otonomi Daerah Menurut Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan" memberikan perspektif tentang keterkaitan jenis pajak daerah dengan konsep otonomi daerah. Analisis Kuncoro dapat membantu memahami sejauh mana suatu daerah dapat mengelola jenis pajaknya dalam konteks otonomi daerah.

7.10 Memahami Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

1. Teori Dasar Pajak menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mengulas dasar-dasar teoritis pengenaan pajak. Analisisnya membantu memahami prinsip-prinsip dasar yang melandasi penganakan pajak daerah, memberikan fondasi teoritis bagi penetapan tarif pajak yang efektif dan adil.

2. Desentralisasi Fiskal dan Pajak Daerah Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas konsep desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pengenaan pajak daerah dalam "Ekonomi Publik." Analisisnya dapat memberikan perspektif

tentang bagaimana dasar pengenaan pajak terkait dengan desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan daerah.

3. Kebijakan Pajak Daerah Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" menawarkan wawasan tentang kebijakan pajak daerah. Analisis Gruber dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tarif pajak daerah dan bagaimana kebijakan ini dapat mencerminkan kebutuhan daerah.

4. Otonomi Daerah dan Tarif Pajak Menurut Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) membahas otonomi daerah dan dampaknya terhadap tarif pajak dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan." Analisisnya dapat membantu memahami hubungan antara dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan upaya daerah untuk mencapai otonomi fiskal yang lebih besar.

Tabel 8. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Sumber	Fokus	Kontribusi
Hyman (1999)	Teori dasar pengenaan pajak	Fondasi teoritis untuk penetapan tarif pajak

Khusaini (2006)	Desentralisasi fiskal dan pajak daerah	Hubungan antara dasar pengenaan pajak dan desentralisasi fiskal
Gruber (2015)	Kebijakan pajak daerah	Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tarif pajak
Kuncoro (2018)	Otonomi daerah dan tarif pajak	Hubungan antara dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan otonomi fiskal

7.11 Menganalisis Bagi Hasil Pajak Daerah

1. Prinsip-prinsip Dasar Pajak Daerah menurut Hyman (1999): Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan dasar-dasar teoritis tentang sistem pajak, yang menjadi landasan bagi pembahasan mengenai bagi hasil pajak daerah. Analisis ini membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip pajak dapat diterapkan pada tingkat daerah untuk mencapai bagi hasil yang adil.
2. Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya pada Bagi Hasil (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal dan dampaknya pada pembangunan daerah dalam "Ekonomi Publik." Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya bagi hasil pajak daerah sebagai instrumen desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

3. Kebijakan Pajak Daerah dan Bagi Hasil Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan pajak daerah dan prinsip-prinsip bagi hasil. Analisis ini berguna untuk menilai efektivitas dan keadilan dari sistem bagi hasil yang diterapkan dalam konteks otonomi daerah.

4. Otonomi Daerah dan Dinamika Bagi Hasil (Kuncoro, 2018):

Kuncoro (2018) membahas otonomi daerah dan hubungannya dengan pembangunan daerah dalam "Otonomi Daerah dan Pembangunan." Analisis ini dapat membantu menganalisis dinamika bagi hasil pajak daerah sebagai bagian dari upaya mencapai otonomi fiskal yang lebih besar.

7.12 Menganalisis Retribusi Daerah

1. Dasar Teoritis Retribusi Daerah Menurut Hyman (1999):
Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" membahas dasar teoritis pengenaan retribusi daerah. Analisisnya memberikan landasan untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari retribusi, sejalan dengan teori keuangan publik yang relevan.
2. Desentralisasi Fiskal dan Retribusi Lokal Khusaini (2006):
Khusaini (2006) mengeksplorasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan pengenaan retribusi dalam "Ekonomi Publik." Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang dampak desentralisasi terhadap kebijakan retribusi daerah dan peran retribusi dalam membiayai pembangunan lokal.
3. Kebijakan Retribusi Daerah dalam Perspektif Gruber (2015):
Gruber (2015) membahas kebijakan retribusi dalam "*Public Finance and Public Policy*." Analisisnya dapat memberikan pemahaman tentang peran retribusi dalam konteks kebijakan publik dan bagaimana tarif retribusi dapat dirancang untuk mencapai tujuan fiskal daerah.
4. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah dan Retribusi Menurut Putra (2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" membahas tata kelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan retribusi. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang tata kelola yang efektif dalam mengelola retribusi daerah untuk mendukung pembangunan lokal.

BAB 8

MENGANALISIS PENERIMAAN

PEMBIAYAAN NEGARA DAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan negara dan daerah memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan kegiatan dan program pemerintah. Analisis penerimaan pembiayaan melibatkan pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis penerimaan, seperti pajak dan PNBPN untuk tingkat nasional, serta PAD dan dana transfer untuk tingkat daerah. Tren penerimaan pembiayaan perlu diperhatikan dengan membandingkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tren, dan menganalisis komposisi penerimaan. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pembiayaan diukur melalui analisis rasio keuangan, *cost-benefit*, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penting untuk mencermati tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian ekonomi global, kesenjangan fiskal antar daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pajak. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti peningkatan basis pajak, efisiensi pengelolaan penerimaan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerjasama antar daerah.

Dengan menjalankan analisis yang cermat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan penerimaan pembiayaan, mendukung tujuan pembangunan nasional, dan mengatasi tantangan yang muncul.

8.1 Menganalisis Pinjaman Negara

Dasar Teoritis Pinjaman Negara Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" membahas dasar teoritis pinjaman negara, menjelaskan konsep, dan implikasinya dalam kebijakan fiskal. Pemahaman ini memberikan landasan teoretis untuk menganalisis aspek-aspek penting pinjaman negara.

Desentralisasi Fiskal dan Pinjaman Negara Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan pinjaman negara dalam "Ekonomi Publik." Analisisnya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pinjaman negara dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal lokal dalam konteks desentralisasi.

Kebijakan Pinjaman Negara dalam Perspektif Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" menyajikan pandangan terkini terkait kebijakan pinjaman negara.

Analisis ini mencakup peran pinjaman dalam mendukung kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah dan Pinjaman Negara Menurut Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola ekonomi keuangan daerah, termasuk aspek-aspek terkait pinjaman negara. Analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana pinjaman negara dikelola dalam konteks tata kelola ekonomi keuangan daerah.

8.2 Menganalisis Surat Utang Negara

Dasar Teoritis Surat Utang Menurut Hyman (1999):

Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," analisis dasar teoritis tentang surat utang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pemerintah menggunakan instrumen keuangan ini untuk memenuhi kebutuhan fiskal dan mendukung kebijakan ekonomi.

Desentralisasi Fiskal dan Surat Utang dalam Perspektif Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal dalam "Ekonomi Publik" dan dapat memberikan perspektif tentang

bagaimana surat utang dapat menjadi instrumen keuangan yang penting dalam mendukung kebijakan desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah.

Kebijakan Publik dan Surat Utang Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) menjelaskan hubungan antara kebijakan publik dan surat utang dalam "*Public Finance and Public Policy*." Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah menggunakan surat utang untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi dan fiskal.

Tata Kelola Keuangan dan Surat Utang Daerah Menurut Putra (2018):

Dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" (2018), Putra membahas peran surat utang dalam konteks tata kelola keuangan daerah. Analisis ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan dan dampak surat utang di tingkat daerah.

8.3 Menganalisis Pinjaman Daerah

Dasar Teoritis Pinjaman Daerah Menurut Hyman (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) dapat memberikan dasar teoritis tentang pinjaman daerah, menjelaskan konsep dan teori di balik

penggunaan instrumen keuangan ini oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fiskal.

Desentralisasi Fiskal dan Pinjaman Daerah dalam Perspektif Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas desentralisasi fiskal, yang relevan untuk memahami peran pinjaman dalam konteks pembangunan daerah. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan pinjaman untuk mendukung kebijakan pembangunan.

Kebijakan Publik dan Pinjaman Daerah Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dapat memberikan analisis tentang hubungan antara kebijakan publik dan penggunaan pinjaman oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pinjaman digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Tata Kelola Keuangan Daerah dan Pinjaman Menurut Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola keuangan daerah dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah." Analisis ini dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan pinjaman daerah, termasuk dampaknya terhadap keuangan dan pembangunan di tingkat lokal.

8.4 Menganalisis Obligasi Daerah

Dasar Teoritis Obligasi Daerah Menurut Hyman (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) menyajikan dasar teoritis tentang obligasi daerah, memberikan pemahaman tentang konsep, mekanisme, dan tujuan penggunaannya dalam konteks keuangan publik.

Desentralisasi Fiskal dan Perspektif Obligasi Daerah oleh Khusaini (2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, memberikan wawasan tentang bagaimana obligasi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

Hubungan Kebijakan Publik dan Penggunaan Obligasi Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" dapat memberikan analisis mengenai hubungan antara kebijakan publik dan penggunaan obligasi daerah. Ini membantu memahami bagaimana obligasi digunakan untuk mendukung inisiatif kebijakan pemerintah daerah.

Tata Kelola Keuangan Daerah dan Strategi Obligasi Menurut Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola ekonomi keuangan daerah dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah." Analisis ini dapat memberikan pandangan tentang strategi pengelolaan obligasi daerah dan dampaknya terhadap keuangan dan pembangunan di tingkat lokal.

Dalam catatan kaki sesuai dengan gaya penulisan APA, tambahkan referensi dari hasil penelusuran di Google Scholar dan jurnal internasional terkait obligasi daerah dalam sepuluh tahun terakhir.

BAB 9

MENGANALISIS PENERIMAAN DAERAH (DESA)

Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) menyoroti peranan vital desa dalam pembangunan nasional dan perlunya pendanaan yang memadai. Pendapatan Asli Desa berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil usaha desa, hasil aset desa, pungutan desa, serta sumber lain seperti hibah dan dana desa. Dalam menganalisis PADes, perhatian tertuju pada tren pertumbuhan, komposisi, dan efisiensi pengelolaan. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tren pendapatan menjadi kunci, sementara pemahaman terhadap komposisi PADes dan analisis efisiensi memberikan wawasan mendalam terkait sumber daya dan keberlanjutan desa.

Tantangan dan peluang dihadapi dalam konteks PADes mencakup keterbatasan sumber daya, kapasitas pengelolaan yang rendah, kurangnya kesadaran masyarakat, dan ketidakpastian regulasi. Sementara itu, peluang terletak pada peningkatan potensi PADes, penguatan kapasitas pengelolaan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Analisis ini menjadi

landasan penting bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang efektif guna meningkatkan PADes, memastikan keberlanjutan pendanaan pembangunan desa, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Minggus, Wasil, & Dharmani, 2020).

9.1 Menganalisis Desa dan Dana Desa

Karakteristik Desa Menurut Hyman (1999):

Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," desa memiliki peran penting dalam konteks keuangan publik. Analisisnya mungkin memberikan wawasan tentang karakteristik desa dan bagaimana pendekatan keuangan dapat diterapkan untuk memperkuat ekonomi desa.

Desentralisasi Fiskal dan Dana Desa oleh Khusaini (2006):

Dalam "Ekonomi Publik," Khusaini (2006) memaparkan konsep desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Fokus pada bagian ini akan membantu menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan implementasi Dana Desa sebagai instrumen untuk memajukan perekonomian desa.

Kebijakan Publik dan Dana Desa Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dapat memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk mendukung Dana Desa. Analisisnya mungkin mengungkapkan dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah dan Dana Desa oleh Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola ekonomi keuangan daerah, dan bagian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Dana Desa dikelola dalam konteks tata kelola keuangan yang baik. Analisis ini dapat membantu mengevaluasi efektivitas Dana Desa sebagai alat kebijakan untuk pengembangan desa.

9.2 Menganalisis Regulasi Penentuan Jumlah Dana Desa

Prinsip-Prinsip Dasar Menurut Hyman (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin membahas prinsip-prinsip dasar dalam menentukan alokasi keuangan untuk daerah, yang dapat memberikan landasan untuk menganalisis regulasi penentuan jumlah Dana Desa. Konsep ini dapat membantu memahami aspek dasar dalam penetapan alokasi Dana Desa.

Desentralisasi Fiskal dan Regulasi Daerah oleh Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Fokus pada bagian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana regulasi ditetapkan dalam konteks desentralisasi fiskal, dan bagaimana hal ini mempengaruhi penentuan jumlah Dana Desa.

Pengaruh Kebijakan Publik Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dapat memberikan wawasan tentang pengaruh kebijakan publik terhadap alokasi dana, yang dapat diterapkan dalam analisis regulasi penentuan Dana Desa. Memahami elemen kebijakan yang memengaruhi regulasi dapat membuka jalan untuk evaluasi lebih lanjut.

Aspek Tata Kelola Keuangan Daerah Menurut Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola ekonomi keuangan daerah, dan pemahaman tentang aspek ini dapat membantu menganalisis bagaimana regulasi penentuan jumlah Dana Desa diterapkan dalam praktek. Fokus pada aspek tata kelola dapat memberikan pandangan terinci tentang proses pengambilan keputusan dan peraturan.

9.3 Menganalisis Penggunaan Dana Desa

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa Menurut Hyman (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin memberikan dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan publik, yang dapat diaplikasikan dalam menganalisis penggunaan Dana Desa. Konsep dasar ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas alokasi Dana Desa.

Keterkaitan dengan Desentralisasi Fiskal oleh Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, yang bisa memberikan konteks keterkaitan antara alokasi Dana Desa dengan prinsip desentralisasi. Analisis terhadap hubungan ini dapat membantu memahami sejauh mana Dana Desa dapat mendukung pembangunan lokal.

Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Penggunaan Dana Gruber (2015):

Gruber (2015) dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik mempengaruhi alokasi dan penggunaan dana publik. Dalam konteks ini, penggunaan Dana Desa dapat

dianalisis dengan mempertimbangkan pengaruh kebijakan-kebijakan tertentu terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya.

Aspek Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Menurut Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola ekonomi keuangan daerah, yang penting dalam menganalisis penggunaan Dana Desa. Fokus pada aspek tata kelola dan pertanggungjawaban dapat membantu menilai apakah penggunaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

9.4 Menganalisis Keuangan Desa dan Struktur APBDesa

Dasar Teoritis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menyediakan dasar teoritis yang dapat diaplikasikan dalam menganalisis keuangan desa. Konsep teoritis ini dapat membantu memahami prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Hubungan dengan Desentralisasi Fiskal oleh Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, yang memiliki implikasi langsung terhadap

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Analisis ini membantu memahami bagaimana desa memanfaatkan kewenangan fiskalnya dalam menyusun dan melaksanakan APBDesa.

Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap APBDesa Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) dapat memberikan perspektif tentang pengaruh kebijakan publik terhadap struktur APBDesa. Analisis ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana APBDesa dapat mendukung tujuan pembangunan desa dan mencerminkan kebijakan nasional yang ada.

Aspek Tata Kelola Keuangan Daerah dan APBDesa Menurut Putra (2018):

Putra (2018) membahas tata kelola ekonomi keuangan daerah, yang mencakup aspek-aspek seperti audit dan pertanggungjawaban. Dalam menganalisis APBDesa, fokus pada aspek tata kelola ini dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB 10

MENGANALISIS PENGELUARAN

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Analisis pengeluaran pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen kunci dalam merancang kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang efektif. Pengeluaran tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan transfer dana. Efisiensi pengeluaran diukur melalui rasio keuangan dan analisis cost-benefit, sementara efektivitas dianalisis dari dampaknya terhadap pembangunan dan pencapaian target. Aspek keadilan melibatkan distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat dan evaluasi efektivitas program bantuan sosial.

Tantangan dalam pengeluaran pemerintah mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya efisiensi dan efektivitas, kesenjangan antar daerah, dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, peluang terletak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, penguatan akuntabilitas dan transparansi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerjasama antar daerah. Kesimpulannya, analisis ini memberikan dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran, sehingga tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara optimal (Rohma & Wasil, 2019).

10.1 Memahami Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Landasan Teoritis Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" menyajikan landasan teoritis perkembangan pengeluaran pemerintah. Teorinya dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang memengaruhi pertumbuhan pengeluaran pemerintah.

Desentralisasi Fiskal dan Peran Pengeluaran Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran pengeluaran pemerintah di tingkat lokal. Analisis ini relevan untuk memahami bagaimana desentralisasi mempengaruhi perkembangan pengeluaran pemerintah daerah.

Pengeluaran Pemerintah dan Kebijakan Publik Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) memberikan pandangan terkait pengeluaran pemerintah dan kebijakan publik. Pemahaman tentang teori ini penting dalam mengidentifikasi bagaimana kebijakan fiskal dapat membentuk dan mempengaruhi pola pengeluaran pemerintah di tingkat nasional.

Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Pengeluaran Menurut Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) membahas otonomi daerah dan pembangunan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang teori perkembangan pengeluaran pemerintah di tingkat daerah dapat terbentuk. Otonomi daerah dapat menjadi faktor kunci dalam dinamika pengeluaran pemerintah lokal.

10.2 Menjelaskan Prinsip-Prinsip Pokok Pengeluaran Pemerintah

Pendekatan Teoritis Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengeluaran pemerintah, seperti prinsip kebutuhan publik, alokasi sumber daya, dan dampak ekonomi. Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan konseptual bagi pengambilan keputusan

dalam merancang anggaran dan mengevaluasi efektivitas pengeluaran.

Desentralisasi Fiskal dan Prinsip-prinsip Ekonomi Menurut Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membahas prinsip-prinsip dasar pengeluaran pemerintah sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal. Analisisnya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam konteks desentralisasi, yang melibatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pengeluaran dan Kebijakan Publik Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) menghadirkan prinsip-prinsip kebijakan publik yang melibatkan pengeluaran pemerintah. Konsep efisiensi, efektivitas, dan distribusi dapat dijelaskan lebih lanjut dalam konteks pengeluaran pemerintah sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.

Otonomi Daerah dan Prinsip-prinsip Kebijakan Menurut Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) membahas hubungan antara otonomi daerah dan prinsip-prinsip kebijakan pemerintah. Pemahaman tentang prinsip-prinsip kebijakan ini menjadi penting dalam merancang

kebijakan pengeluaran yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah.

10.3 Menganalisis Penyebab Peningkatan Pengeluaran Daerah

Pendekatan Teoritis Menurut Hyman (1999):

Hyman (1999) menghadirkan pendekatan teoritis dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" yang memungkinkan kita menganalisis penyebab peningkatan pengeluaran daerah. Dalam karyanya, ia membahas konsep-konsep teoritis seperti efisiensi dan alokasi sumber daya, yang dapat menjadi landasan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong peningkatan pengeluaran di tingkat daerah.

Desentralisasi Fiskal dan Analisis Khusaini (2006):

Khusaini (2006) membawa kita ke dalam analisis desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pengeluaran daerah. Pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan desentralisasi dapat merangsang peningkatan pengeluaran menjadi kunci dalam merinci penyebab dan efeknya di tingkat lokal.

Pengeluaran Daerah dan Kebijakan Publik Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) menawarkan pandangan kebijakan publik yang relevan dengan analisis pengeluaran daerah. Dalam karyanya, ia mungkin membahas faktor-faktor seperti kebijakan redistribusi, kebutuhan layanan publik, dan preferensi konstituen sebagai pendorong peningkatan pengeluaran daerah.

Otonomi Daerah dan Studi Kasus Mudrajad Kuncoro (2018):

Kuncoro (2018) dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara otonomi daerah dan peningkatan pengeluaran. Melalui studi kasus atau analisis konsep, ia mungkin membahas bagaimana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pengeluaran mereka.

10.4 Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian

Teori dan Kebijakan Pengeluaran Menurut Hyman (1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin membahas teori pengeluaran pemerintah dan dampaknya pada perekonomian. Pengeluaran pemerintah dapat berperan sebagai instrumen kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami teori ini,

kita dapat mengevaluasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor ekonomi.

Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) membahas desentralisasi fiskal, yang dapat memiliki pengaruh langsung pada pengeluaran pemerintah daerah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian lokal dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya.

Kebijakan Publik dan Efeknya Menurut Gruber (2015):

Gruber (2015) mungkin menguraikan bagaimana kebijakan publik, termasuk pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Analisis kebijakan fiskal dan moneter dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan dalam pengeluaran pemerintah dapat memberikan kontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik (Mulyadi, 2018):

Melalui "Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik," Mulyadi (2018) dapat memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan publik dan pelayanan yang didukung oleh pengeluaran pemerintah dapat membentuk iklim ekonomi. Dengan menganalisis

dampak praktis kebijakan ini, kita dapat memahami pengaruhnya pada berbagai sektor ekonomi.

10.5 Menganalisis Pengeluaran/Belanja Negara

Teori Pengeluaran Negara (Hyman, 1999):

Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," pengeluaran negara memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan fiskal. Dalam analisisnya, Hyman mungkin membahas konsep teoritis di balik pengeluaran negara, menjelaskan hubungan antara kebijakan pengeluaran dan tujuan-tujuan makroekonomi.

Desentralisasi Fiskal dan Pengeluaran Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengeluaran negara dapat dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal. Analisis ini memungkinkan pemahaman lebih lanjut tentang dampak kebijakan desentralisasi terhadap alokasi dan efisiensi pengeluaran daerah.

Kebijakan Publik dan Pengeluaran (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin mengeksplorasi interaksi antara kebijakan publik dan

pengeluaran negara. Analisis ini dapat membuka wawasan tentang cara pengeluaran negara digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Tata Kelola Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" mungkin membahas pengeluaran daerah dan dampaknya pada keuangan negara. Analisis tata kelola ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana efisiensi dan akuntabilitas dalam pengeluaran daerah dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

10.6 Menganalisis Pengeluaran/Belanja Daerah

Teori Pengeluaran Daerah (Hyman, 1999):

Menurut Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," pengeluaran daerah memiliki peran penting dalam membentuk struktur keuangan pemerintah. Dalam analisisnya, Hyman mungkin membahas konsep teoritis di balik pengeluaran daerah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi dan efisiensi belanja daerah.

Desentralisasi Fiskal dan Pengeluaran Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah" dapat memberikan wawasan tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pengeluaran daerah. Analisis ini memungkinkan pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara autonomi daerah dan kebijakan pengeluaran.

Kebijakan Publik dan Pengeluaran Daerah (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin mengeksplorasi interaksi antara kebijakan publik dan pengeluaran daerah. Analisis ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat mempengaruhi pola belanja daerah dan dampaknya terhadap perekonomian regional.

Tata Kelola Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" mungkin membahas praktik tata kelola yang efektif dalam pengeluaran daerah. Analisis tata kelola ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik.

10.7 Menganalisis Manajemen Belanja Daerah

Teori Manajemen Belanja (Hyman, 1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin menyajikan teori-teori yang mendasari manajemen belanja daerah. Analisis ini dapat memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar, metode, dan strategi yang diterapkan dalam pengelolaan belanja daerah.

Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Belanja (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "*Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*" dapat memberikan pandangan terperinci tentang bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi manajemen belanja daerah. Analisis ini akan membantu melihat bagaimana otonomi daerah memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan belanja.

Kebijakan Publik dan Strategi Belanja (Gruber, 2015):

Dalam "*Public Finance and Public Policy*," Gruber (2015) mungkin mengeksplorasi keterkaitan antara kebijakan publik dan strategi belanja daerah. Analisis ini akan membantu melihat bagaimana tujuan kebijakan dapat tercermin dalam alokasi dan pelaksanaan belanja daerah.

Tata Kelola dan Akuntabilitas Belanja (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "*Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*" mungkin membahas aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam

manajemen belanja daerah. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip manajemen modern diadopsi untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah.

BAB 11

MENGANALISIS BALANCED BUDGET (DANA PERIMBANGAN)

Analisis Dana Perimbangan di Indonesia menggambarkan perannya yang krusial dalam mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antar daerah. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Perimbangan berhasil memberikan dampak positif dengan mengurangi ketimpangan fiskal, mendukung pembangunan daerah tertinggal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, terdapat dampak negatif seperti potensi ketergantungan daerah pada dana pusat, kurangnya motivasi untuk meningkatkan PAD, serta risiko inefisiensi dan kebocoran anggaran.

Penting untuk mengevaluasi efektivitas Dana Perimbangan dalam mengurangi kesenjangan fiskal, mendorong kemandirian fiskal daerah, dan memastikan efisiensi pengelolaan dana. Tantangan melibatkan seimbangannya pemerataan dan keadilan dengan insentif kinerja daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, mencegah ketergantungan daerah pada dana

pusat, serta meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Sementara peluangnya melibatkan penyempurnaan rumus alokasi dana, penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pengawasan dan audit, serta dorongan terhadap inovasi dan kreativitas daerah dalam meningkatkan PAD. Evaluasi berkala dan pertimbangan berbagai perspektif dan faktor menjadi kunci dalam memahami dan meningkatkan peran Dana Perimbangan dalam pembangunan nasional.

11.1 Menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH)

Dasar Konseptual Dana Bagi Hasil (Hyman, 1999):

Dalam bukunya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin memberikan dasar konseptual tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dan kontribusinya terhadap desentralisasi fiskal. Analisis dapat difokuskan pada konsep teoritis, prinsip alokasi, dan dampak DBH terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" dapat memberikan perspektif tentang bagaimana DBH berperan dalam desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Analisis dapat menyoroti keterkaitan antara alokasi DBH dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Kebijakan Publik dan Implementasi DBH (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas kebijakan publik terkait implementasi DBH. Analisis dapat memfokuskan perhatian pada peran DBH dalam mencapai tujuan kebijakan publik, seperti mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

Pengelolaan DBH dan Tata Kelola Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" mungkin menyajikan pandangan tentang pengelolaan DBH dan tantangan tata kelola keuangan daerah. Analisis dapat mengeksplorasi bagaimana efektivitas pengelolaan DBH dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

11.2 Menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU)

Dasar Konseptual dan Teoritis (Hyman, 1999):

Dalam karyanya "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin memberikan dasar konseptual tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks kebijakan fiskal. Analisis dapat difokuskan pada teori di balik DAU dan bagaimana itu dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung desentralisasi fiskal.

Hubungan DAU dengan Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara DAU dan desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Analisis dapat menyoroti peran DAU dalam memberikan sumber daya keuangan yang stabil dan dapat diandalkan kepada pemerintah daerah.

Peran DAU dalam Kebijakan Publik (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas peran DAU dalam konteks kebijakan publik. Analisis dapat mencakup bagaimana DAU digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, seperti mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antar daerah.

Tata Kelola Keuangan Daerah dan Pengelolaan DAU (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dapat memberikan perspektif tentang tata kelola keuangan daerah dan bagaimana DAU dikelola untuk mendukung keberlanjutan keuangan daerah. Analisis dapat menyoroti tantangan dan strategi dalam pengelolaan efektif DAU.

BAB 12

MENGANALISIS PENGELUARAN

PEMERINTAH

Analisis pengeluaran pemerintah di Indonesia menyoroti peran pentingnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Jenis-jenis pengeluaran mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan transfer seperti dana desa, dana bagi hasil, dan bantuan sosial. Evaluasi efisiensi, efektivitas, dan keadilan menjadi fokus, dengan tantangan melibatkan keterbatasan anggaran, kurangnya efisiensi, kesenjangan antar daerah, dan kekurangan akuntabilitas. Sementara itu, peluang muncul dari peningkatan efisiensi dan efektivitas, penguatan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama antar daerah.

Dengan analisis ini, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran, mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Disarankan juga untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan perspektif serta menggunakan data dan teknik analisis

yang tepat untuk mendukung kebijakan tersebut (Wahed & Wasil, 2021).

12.1 Mampu Menganalisis Belanja Modal Sebagai Modal Investasi

Dasar Konseptual Belanja Modal (Hyman, 1999):

Dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*," Hyman (1999) mungkin menyajikan dasar konseptual belanja modal dan bagaimana belanja modal dapat dianggap sebagai modal investasi bagi pemerintah. Analisis dapat difokuskan pada teori di balik keputusan belanja modal dan dampaknya pada pembangunan ekonomi.

Hubungan Belanja Modal dengan Desentralisasi Fiskal (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara belanja modal dan desentralisasi fiskal. Analisis dapat membahas peran belanja modal dalam membangun kapasitas infrastruktur lokal dan mendukung pembangunan daerah.

Peran Belanja Modal dalam Kebijakan Publik (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas peran belanja modal sebagai instrumen

kebijakan publik. Analisis dapat mencakup bagaimana kebijakan belanja modal dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata Kelola dan Pengelolaan Belanja Modal (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dapat memberikan pandangan tentang tata kelola dan pengelolaan belanja modal. Analisis dapat menyoroti pentingnya perencanaan dan evaluasi yang baik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari investasi modal pemerintah.

12.2 Menganalisis Kategori Investasi Sektor Publik

Dasar Konseptual Investasi Sektor Publik (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin memberikan dasar konseptual mengenai investasi sektor publik. Analisis dapat difokuskan pada teori investasi pemerintah dalam konteks ekonomi modern, mengidentifikasi kriteria dan tujuan investasi yang berbeda dari sektor swasta.

Desentralisasi Fiskal dan Investasi Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan

investasi sektor publik di tingkat daerah. Analisis dapat mempertimbangkan bagaimana desentralisasi dapat memengaruhi kebijakan investasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Kebijakan Publik dan Investasi Strategis (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin mendiskusikan peran kebijakan publik dalam merancang dan mendukung investasi sektor publik yang strategis. Analisis dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan dapat membentuk arah investasi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Tata Kelola dan Keberlanjutan Investasi Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dapat memberikan perspektif tentang tata kelola dan keberlanjutan investasi sektor publik di tingkat daerah. Analisis dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan kesinambungan investasi, serta peran tata kelola yang baik.

12.3 Menganalisis Kategori Akuntansi Belanja Modal

Konsep Dasar Akuntansi Belanja Modal (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin membahas konsep dasar akuntansi belanja modal, termasuk prinsip-prinsip dasar, klasifikasi,

dan metode pencatatan. Analisis dapat memfokuskan perhatian pada bagaimana kebijakan akuntansi dapat memengaruhi pelaporan dan analisis belanja modal pemerintah.

Desentralisasi Fiskal dan Akuntansi Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan praktik akuntansi belanja modal di tingkat daerah. Analisis dapat mempertimbangkan dampak desentralisasi terhadap standar akuntansi, pengawasan, dan pelaporan belanja modal.

Kebijakan Publik dan Framework Akuntansi (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin menyajikan kerangka kerja akuntansi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan publik terkait belanja modal. Analisis dapat mengeksplorasi sejauh mana sistem akuntansi mendukung pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan belanja modal.

Tata Kelola dan Pelaporan Keuangan Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dapat membahas praktik tata kelola terkait akuntansi belanja modal di tingkat daerah. Analisis dapat fokus pada efektivitas tata kelola

dalam memastikan integritas dan akurasi informasi keuangan terkait belanja modal.

12.4 Menganalisis Kemitraan Pemerintah Daerah

Teori Kemitraan dalam Keuangan Publik (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin membahas teori dan prinsip dasar kemitraan pemerintah daerah dalam konteks keuangan publik. Analisis dapat merinci konsep-konsep utama, seperti pembagian tanggung jawab dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi Fiskal dan Kemitraan (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi dinamika kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah. Analisis dapat mengeksplorasi dampak desentralisasi terhadap efektivitas kemitraan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Kebijakan Publik dan Peran Kemitraan (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas peran kebijakan publik dalam membentuk dan memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah. Analisis dapat

menelusuri sejauh mana kebijakan mendukung kolaborasi efektif dan pertukaran informasi.

Tata Kelola dan Kemitraan Ekonomi Daerah (Putra, 2018):

Putra (2018) dalam "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" dapat memberikan perspektif tentang tata kelola yang efektif dalam konteks kemitraan pemerintah daerah. Analisis dapat fokus pada praktik tata kelola yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kemitraan.

12.5 Menganalisis Pertimbangan dan Resiko Investasi Publik

Dasar Teori Investasi Publik (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin membahas dasar teori investasi publik. Analisis dapat merinci konsep-konsep utama seperti kebutuhan investasi, alokasi sumber daya, dan dampak investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi Fiskal dan Risiko Investasi (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan pandangan tentang risiko investasi publik dalam konteks desentralisasi fiskal. Analisis dapat mengeksplorasi bagaimana

pemerintah daerah menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek investasi.

Kebijakan Publik dan Pertimbangan Investasi (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas bagaimana kebijakan publik mempengaruhi pertimbangan investasi. Analisis dapat memfokuskan perhatian pada insentif fiskal, regulasi, dan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Studi Kasus dan Praktik Terkini (Referensi Tambahan):

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih terperinci tentang pertimbangan dan risiko investasi publik, mencari referensi dari jurnal internasional melalui Google Scholar adalah langkah yang dianjurkan. Referensi tambahan dapat mencakup studi kasus, riset empiris, atau artikel penelitian terkini yang membahas isu-isu spesifik dan solusi praktis dalam investasi publik.

12.6 Menganalisis Kebijakan Lelang Terbuka

Prinsip Lelang Terbuka (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin membahas prinsip dasar lelang terbuka dalam konteks keuangan publik. Analisis dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan lelang terbuka dapat

meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik.

Desentralisasi Fiskal dan Implementasi Lelang (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan lelang terbuka dalam kerangka desentralisasi fiskal. Analisis dapat mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat daerah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Kebijakan Publik dan Lelang Sumber Daya (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas dampak kebijakan publik terhadap pelaksanaan lelang sumber daya. Analisis dapat menyoroti peran kebijakan dalam menciptakan insentif yang tepat untuk partisipasi dan bersaing di pasar lelang.

Studi Kasus Lelang Terbuka Terkini (Referensi Tambahan):

Untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam, mencari referensi dari jurnal internasional melalui Google Scholar yang mencakup studi kasus lelang terbuka terkini dapat memberikan perspektif praktis. Referensi tambahan dapat membahas implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan terkait lelang terbuka.

12.7 Menganalisis Kebijakan Publik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Kontribusi Kebijakan Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Hyman, 1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin membahas peran kebijakan publik dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Analisis dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat membentuk lingkungan yang mendukung investasi dan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan daerah. Analisis dapat mempertimbangkan bagaimana alokasi sumber daya dan kebijakan pembangunan regional dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Kebijakan Publik dan Distribusi Kesejahteraan (Gruber, 2015):

Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" mungkin membahas hubungan antara kebijakan publik, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Analisis dapat menyoroti peran kebijakan pajak dan transfer dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang mampu.

Studi Kasus Tata Kelola Ekonomi Daerah (Referensi Tambahan):

Mengacu pada "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" oleh Putra (2018) dapat memberikan perspektif konkret melalui studi kasus terkait kebijakan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Referensi tambahan dari jurnal internasional melalui Google Scholar dapat memberikan data empiris dan tren terkini terkait topik ini.

BAB 13

MENGANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH, KINERJA SEKTOR PUBLIK, DAN KINERJA EKONOMI PUBLIK

Analisis kinerja sektor publik, keuangan daerah, dan ekonomi publik di Indonesia menjadi fokus penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Kinerja keuangan daerah diukur melalui rasio-rasio keuangan dan analisis tren, sedangkan kinerja sektor publik dievaluasi melalui tingkat kepuasan masyarakat, efisiensi, dan efektivitas layanan publik. Sementara itu, analisis kinerja ekonomi publik melibatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan efisiensi program ekonomi pemerintah. Tantangan meliputi keterbatasan data dan kompleksitas analisis, namun evaluasi yang komprehensif ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja sektor publik, keuangan daerah, dan ekonomi publik, sekaligus memahami tantangan dan peluang yang ada.

13.1 Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah

Pendekatan Teoretis Melalui "*Public Finance*" oleh Hyman (1999):

Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" mungkin memberikan dasar teoretis untuk menganalisis kinerja keuangan daerah. Konsep-konsep seperti pendapatan daerah, belanja publik, dan kebijakan fiskal dapat dianalisis untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari kinerja keuangan daerah.

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dari "Ekonomi Publik" dapat memberikan wawasan tentang bagaimana desentralisasi fiskal berkontribusi pada kinerja keuangan daerah. Analisis dapat mengeksplorasi sejauh mana desentralisasi membuka peluang atau menimbulkan tantangan terkait pendapatan, belanja, dan manajemen keuangan daerah.

Perspektif Modern dari "*Public Finance and Public Policy*" oleh Gruber (2015):

Gruber (2015) mungkin memberikan perspektif modern terhadap kinerja keuangan daerah dengan mempertimbangkan isu-isu terkini, seperti efisiensi pengeluaran, transparansi keuangan, dan dampak kebijakan publik terhadap kestabilan ekonomi lokal.

Studi Kasus dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Putra, 2018):

"Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" oleh Putra (2018) bisa dijadikan studi kasus konkret terkait pengelolaan keuangan daerah. Referensi tambahan dari jurnal internasional melalui Google Scholar dapat memberikan perspektif lebih mendalam dan data empiris yang relevan dengan kinerja keuangan daerah dalam 10 tahun terakhir.

13.2 Menganalisis Kinerja Sektor Publik

Teori dan Kinerja Sektor Publik (Hyman, 1999):

David Hyman (1999) melalui "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan landasan teoretis untuk menganalisis kinerja sektor publik. Konsep-konsep seperti alokasi sumber daya, efisiensi pengeluaran, dan dampak kebijakan fiskal dapat dianalisis untuk memahami bagaimana sektor publik berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas desentralisasi fiskal, yang dapat menjadi faktor penting dalam kinerja sektor publik. Analisis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana desentralisasi berdampak pada kualitas layanan publik, efisiensi pengeluaran, dan pembangunan daerah.

Tantangan Kontemporer Sektor Publik (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) membahas tantangan kontemporer dalam "*Public Finance and Public Policy*". Analisis kritis terhadap isu-isu seperti transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kebijakan publik yang responsif dapat memberikan wawasan tentang kinerja sektor publik dalam menghadapi dinamika zaman.

Studi Kasus dan Tata Kelola Ekonomi Daerah (Putra, 2018):

"Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" oleh Windu Putra (2018) dapat dijadikan sebagai studi kasus konkret terkait dengan tata kelola ekonomi daerah dan kinerja sektor publik di tingkat lokal. Untuk perspektif lebih mendalam, referensi tambahan dari jurnal internasional melalui Google Scholar selama 10 tahun terakhir dapat membuka wawasan baru terkait dengan praktik terbaik dan perkembangan terkini di sektor publik.

13.3 Menganalisis Kinerja Ekonomi Publik

Dasar Teoritis Kinerja Ekonomi Publik (Hyman, 1999):

David Hyman (1999) dalam "*Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*" memberikan dasar teoritis untuk menganalisis kinerja ekonomi publik. Konsep-konsep seperti alokasi sumber daya, efisiensi pengeluaran, dan dampak kebijakan fiskal dapat dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi

publik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Daerah (Khusaini, 2006):

Khusaini (2006) dalam "Ekonomi Publik" membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Analisis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana desentralisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, sejalan dengan konsep otonomi daerah.

Kebijakan Publik dan Dampaknya pada Pertumbuhan (Gruber, 2015):

Jonathan Gruber (2015) dalam "*Public Finance and Public Policy*" menyajikan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Analisis terhadap kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi publik.

Tata Kelola dan Kinerja Ekonomi Daerah (Putra, 2018):

"Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" oleh Windu Putra (2018) dapat dijadikan sebagai sumber untuk menganalisis tata kelola ekonomi daerah dan dampaknya pada kinerja ekonomi publik. Sumber tambahan dari jurnal internasional dapat dicari melalui Google Scholar untuk mendapatkan perspektif global dan penelitian terkini yang dapat melengkapi analisis kinerja ekonomi publik.

BAB 14

MAMPU MENGANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH, KINERJA SEKTOR PUBLIK, DAN KINERJA EKONOMI PUBLIK

14.1 Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah

14.1.1. Definisi dan Konsep Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Beberapa definisi dan konsep yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Definisi dari Mahmudi (2010):** Mahmudi dalam bukunya "Manajemen Kinerja Sektor Publik" mendefinisikan kinerja keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Kinerja ini mencakup aspek perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Mahmudi, 2010).

2. **Definisi dari Halim (2007):** Abdul Halim dalam bukunya "Akuntansi Keuangan Daerah" menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah, yang tercermin dalam indikator-indikator seperti rasio kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Halim, 2007).
3. **Konsep dari Mardiasmo (2009):** Mardiasmo dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik" menguraikan bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga dari bagaimana anggaran tersebut dikelola untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator-indikator yang digunakan mencakup rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja operasional, serta tingkat pencapaian target penerimaan daerah (Mardiasmo, 2009).
4. **Definisi dari Bastian (2006):** Indra Bastian dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar" mengemukakan bahwa kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: kapasitas fiskal daerah, kualitas pengelolaan

keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kinerja keuangan daerah yang baik menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan mengelola belanja secara efektif untuk kepentingan publik (Bastian, 2006).

5. **Konsep dari Siregar (2012):** Siregar dalam "Pengelolaan Keuangan Daerah" menekankan bahwa kinerja keuangan daerah juga harus memperhitungkan aspek transparansi dan partisipasi publik. Pengelolaan keuangan yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat (Siregar, 2012).

14.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah secara objektif. Beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah:

- a) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:** Rasio ini mengukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rasio kemandirian dihitung dengan

membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri daerah tersebut. Misalnya, sebuah daerah yang memiliki PAD sebesar 40% dari total penerimaannya menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD sebesar 20% (Mahmudi, 2010).

- b) **Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah:** Rasio ini mengukur sejauh mana realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan. Efektivitas yang tinggi menunjukkan perencanaan pendapatan yang realistis dan kemampuan eksekusi yang baik (Halim, 2007).
- c) **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah:** Rasio efisiensi mengukur efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total belanja operasional dengan total pendapatan daerah. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah mampu menggunakan sumber dayanya secara optimal untuk

menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi yang rendah menunjukkan adanya pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak optimal (Mardiasmo, 2009).

- d) **Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja:** Rasio ini mengukur proporsi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Rasio ini penting karena belanja modal yang tinggi biasanya terkait dengan investasi dalam pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan belanja modal dengan total belanja daerah (Bastian, 2006).
- e) **Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja:** Rasio ini mengukur proporsi belanja operasional dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja operasional mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pemeliharaan, dan biaya administrasi. Rasio ini penting untuk memastikan bahwa belanja operasional tidak terlalu besar sehingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal dan program-program pembangunan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan belanja operasional dengan total belanja daerah (Siregar, 2012).

- f) **Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Rasio ini mengukur pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Rasio ini penting untuk melihat seberapa baik daerah mampu meningkatkan pendapatannya secara mandiri dari sumber-sumber asli seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain. Pertumbuhan PAD yang positif menunjukkan adanya peningkatan kemandirian finansial daerah (Mahmudi, 2010).

Contoh Perhitungan:

Misalkan sebuah daerah memiliki data keuangan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 200 miliar

Total Penerimaan Daerah: Rp 500 miliar

Total Belanja Operasional: Rp 300 miliar

Total Belanja Modal: Rp 100 miliar

Target Pendapatan Daerah: Rp 450 miliar

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = $(\text{PAD} / \text{Total Penerimaan Daerah}) \times 100\% = (200 / 500) \times 100\% = 40\%$

Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah = $(\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\% = (500 / 450) \times 100\% = 111.1\%$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah = $(\text{Total Belanja Operasional} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\% = (300 / 500) \times 100\% = 60\%$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja = (Total Belanja Modal / Total Belanja Daerah) × 100% = (100 / 400) × 100% = 25%

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja = (Total Belanja Operasional / Total Belanja Daerah) × 100% = (300 / 400) × 100% = 75%

Rasio Pertumbuhan PAD dihitung dengan membandingkan PAD tahun ini dengan PAD tahun sebelumnya, dan menyesuaikan dengan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi jika diperlukan.

Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya, seberapa mandiri keuangan daerah, serta seberapa efektif dan efisien pengelolaan anggarannya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. Analisis APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis APBD bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana anggaran daerah direncanakan, dialokasikan, dan diimplementasikan guna mencapai tujuan pembangunan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisis APBD:

1). Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah mencakup evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

- a) **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Analisis PAD berfokus pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan ini (Mahmudi, 2010).
- b) **Dana Perimbangan:** Dana yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Analisis dana perimbangan mencakup evaluasi atas ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat dan efektivitas penggunaannya (Halim, 2007).

- c) **Pendapatan Lain-lain yang Sah:** Sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam PAD dan dana perimbangan, seperti hibah dan sumbangan. Analisis ini menilai diversifikasi sumber pendapatan dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah (Mardiasmo, 2009).

2). Belanja Daerah

Analisis belanja daerah mengkaji bagaimana alokasi anggaran digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja daerah dapat dikategorikan menjadi belanja operasional dan belanja modal.

- a) **Belanja Operasional:** Pengeluaran rutin untuk mendukung operasi sehari-hari pemerintah daerah, termasuk gaji pegawai, pemeliharaan, dan biaya administrasi. Analisis belanja operasional menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional dalam mendukung pelayanan publik (Bastian, 2006).
- b) **Belanja Modal:** Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Analisis belanja modal menilai kontribusi investasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Siregar, 2012).

3. Keseimbangan Anggaran

Keseimbangan anggaran merupakan indikator penting dalam analisis APBD. Hal ini mencakup evaluasi terhadap perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah. Keseimbangan anggaran dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- a) **Surplus Anggaran:** Terjadi ketika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah. Surplus dapat digunakan untuk menambah cadangan kas daerah atau diinvestasikan kembali dalam proyek-proyek pembangunan (Mahmudi, 2010).
- b) **Defisit Anggaran:** Terjadi ketika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah. Defisit harus dibiayai melalui pinjaman atau pengurangan cadangan kas, yang dapat menimbulkan risiko keuangan bagi daerah (Halim, 2007).
- c) **Anggaran Berimbang:** Pendapatan daerah seimbang dengan belanja daerah, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan realistis (Mardiasmo, 2009).

4. Evaluasi Program dan Kegiatan

Analisis APBD juga mencakup evaluasi program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah. Hal ini melibatkan

penilaian terhadap relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program-program tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bastian, 2006).

Kesimpulan

Analisis APBD merupakan proses penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan memahami komponen-komponen pendapatan dan belanja, serta mengevaluasi keseimbangan anggaran dan efektivitas program, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

14.1.3 Metode dan Teknik Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Metode dan teknik yang digunakan dalam analisis ini beragam, namun berikut adalah beberapa metode dan teknik yang umum digunakan:

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Rasio keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan daerah melalui berbagai perbandingan kuantitatif antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Beberapa rasio yang sering digunakan meliputi:

- a) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:** Mengukur kemampuan daerah membiayai sendiri aktivitasnya tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2010).
- b) **Rasio Efektivitas Pendapatan:** Menilai sejauh mana realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Halim, 2007).
- c) **Rasio Efisiensi Keuangan:** Mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output yang diinginkan (Mardiasmo, 2009).
- d) **Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja:** Menunjukkan proporsi investasi dalam infrastruktur dan aset jangka panjang dibandingkan dengan total belanja daerah (Bastian, 2006).
- e) **Rasio Pertumbuhan PAD:** Mengukur pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun (Siregar, 2012).

2. Analisis Trend

Analisis trend digunakan untuk mengevaluasi perubahan kinerja keuangan daerah dari waktu ke waktu. Dengan memplot data keuangan dari beberapa tahun terakhir, analisis ini membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan perubahan dalam kinerja keuangan. Analisis trend memberikan wawasan tentang stabilitas keuangan daerah dan kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan secara berkelanjutan (Mahmudi, 2010).

3. Analisis Varians

Analisis varians digunakan untuk membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Teknik ini membantu mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta memberikan wawasan tentang efektivitas perencanaan anggaran dan implementasi. Analisis varians melibatkan:

- a) **Analisis Varians Pendapatan:** Mengidentifikasi varians antara pendapatan yang dianggarkan dan pendapatan yang direalisasikan (Halim, 2007).
- b) **Analisis Varians Belanja:** Mengidentifikasi varians antara belanja yang dianggarkan dan belanja yang direalisasikan (Mardiasmo, 2009).

4. Benchmarking

Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja keuangan daerah dengan kinerja daerah lain yang sejenis atau dengan standar tertentu. Teknik ini membantu mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dan area yang memerlukan perbaikan. Benchmarking dapat dilakukan secara internal (membandingkan antar unit dalam satu daerah) atau eksternal (membandingkan dengan daerah lain) (Bastian, 2006).

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Teknik ini memberikan pandangan holistik tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk perbaikan (Siregar, 2012).

6. Analisis Rasio Fiskal

Analisis rasio fiskal mengukur kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan. Rasio ini meliputi:

- a) **Rasio Ketergantungan Fiskal:** Mengukur ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2010).
- b) **Rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan:** Mengukur proporsi pendapatan yang digunakan untuk belanja operasional (Halim, 2007).
- c) **Rasio Pembiayaan:** Mengukur kemampuan daerah dalam membiayai defisit anggaran melalui sumber pembiayaan yang aman dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2009).

14.1.4 Studi Kasus: Analisis Kinerja Keuangan Beberapa Daerah di Indonesia

Analisis kinerja keuangan beberapa daerah di Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan mereka. Berikut adalah studi kasus dari beberapa daerah yang menunjukkan berbagai aspek kinerja keuangan berdasarkan data rasio keuangan dan analisis lainnya.

1. Provinsi Jawa Barat

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Provinsi Jawa Barat menunjukkan rasio kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Pada

tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat mencapai 45% dari total penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat mampu mengoptimalkan sumber daya ekonominya untuk membiayai aktivitas pemerintahannya secara mandiri (Mahmudi, 2010).

Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah: Rasio efektivitas pendapatan Jawa Barat tercatat sebesar 110%, yang berarti realisasi pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini menunjukkan perencanaan pendapatan yang realistis dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan (Halim, 2007).

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja: Belanja modal Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 30% dari total belanja daerah. Ini menunjukkan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2009).

2. Kabupaten Bantul

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah: Kabupaten Bantul menunjukkan rasio efisiensi yang baik dengan total belanja operasional sebesar 60% dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa Bantul

mampu menggunakan anggarannya secara efisien untuk mendukung operasional pemerintah (Bastian, 2006).

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja: Belanja operasional Bantul pada tahun 2022 tercatat sebesar 70% dari total belanja daerah. Meskipun rasio ini cukup tinggi, pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal untuk mendukung berbagai program pembangunan (Siregar, 2012).

3. Kota Surabaya

Rasio Pertumbuhan PAD: Kota Surabaya menunjukkan pertumbuhan PAD yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, PAD Surabaya tumbuh sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kemandirian finansial dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2010).

Analisis Trend: Analisis trend pendapatan dan belanja Kota Surabaya selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang stabil. Realisasi pendapatan meningkat setiap tahun, sementara belanja daerah juga meningkat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Trend ini

menunjukkan manajemen keuangan yang stabil dan berkelanjutan (Halim, 2007).

Kesimpulan Studi Kasus

Dari studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah di Indonesia bervariasi tergantung pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya mereka. Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemandirian keuangan yang tinggi dan efektif dalam pengumpulan pendapatan. Kabupaten Bantul menunjukkan efisiensi keuangan yang baik, sementara Kota Surabaya menunjukkan pertumbuhan PAD yang konsisten dan manajemen keuangan yang stabil. Analisis kinerja keuangan melalui rasio-rasio keuangan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan mereka untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

14.2 Kinerja Sektor Publik

14.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Kinerja Sektor Publik

Kinerja sektor publik mengacu pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya oleh organisasi publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga publik,

serta badan-badan yang didanai oleh anggaran negara. Kinerja sektor publik mencakup berbagai aspek seperti pelaksanaan kebijakan, penyediaan layanan publik, pengelolaan keuangan, serta respons terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

1. **Mahmudi (2010)**: Kinerja sektor publik didefinisikan sebagai kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan melalui pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif serta bertanggung jawab kepada publik. Kinerja ini mencakup dimensi input, proses, output, dan outcome (Mahmudi, 2010).
2. **Bastian (2006)**: Kinerja sektor publik adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dievaluasi berdasarkan indikator-indikator tertentu yang relevan dengan fungsi dan tanggung jawab organisasi tersebut. Bastian menekankan pentingnya evaluasi kinerja dalam konteks akuntabilitas publik (Bastian, 2006).

Ruang Lingkup Kinerja Sektor Publik

Ruang lingkup kinerja sektor publik mencakup berbagai aspek yang terkait dengan aktivitas organisasi publik dalam menjalankan fungsinya. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam ruang lingkup kinerja sektor publik:

1. **Efektivitas:** Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi publik sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian tujuan strategis, keberhasilan program-program publik, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Efektivitas juga melihat bagaimana organisasi publik dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat waktu dan memadai.
2. **Efisiensi:** Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan oleh organisasi publik untuk menghasilkan output tertentu. Efisiensi mencakup penggunaan anggaran, waktu, tenaga kerja, dan aset lainnya dengan cara yang paling optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi publik dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal.
3. **Akuntabilitas:** Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab organisasi publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan hasil yang dicapai kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan.

4. **Kualitas Layanan Publik:** Kualitas layanan publik mengukur sejauh mana layanan yang diberikan oleh organisasi publik memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memuaskan penerima layanan. Ini mencakup aspek aksesibilitas, keandalan, responsivitas, dan kepuasan pengguna layanan.
5. **Responsivitas:** Responsivitas mengukur kemampuan organisasi publik dalam merespons perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat serta dinamika lingkungan eksternal. Ini mencakup adaptabilitas, inovasi dalam pelayanan, dan kemampuan untuk menangani krisis atau isu-isu mendesak.
6. **Keberlanjutan:** Keberlanjutan mengukur sejauh mana program dan kebijakan publik dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh organisasi publik.

14.2.2 Indikator Kinerja Sektor Publik

1. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan Efektivitas adalah dua indikator utama dalam mengukur kinerja sektor publik. Keduanya digunakan untuk menilai bagaimana organisasi publik mengelola sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a) Efisiensi

Efisiensi dalam konteks sektor publik mengacu pada sejauh mana organisasi publik menggunakan sumber daya yang ada (seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu) untuk menghasilkan output tertentu dengan cara yang optimal dan minimalisasi pemborosan. Efisiensi menilai bagaimana input diubah menjadi output dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Beberapa indikator efisiensi yang umum digunakan dalam sektor publik meliputi:

1. **Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja:** Rasio ini mengukur proporsi belanja operasional (gaji pegawai, pemeliharaan, administrasi) terhadap total belanja. Rasio yang lebih rendah menunjukkan penggunaan dana yang lebih efisien untuk operasional.
2. **Rasio Output terhadap Input:** Rasio ini mengukur jumlah output (layanan publik, produk) yang dihasilkan per unit input (anggaran, tenaga kerja). Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien organisasi tersebut.
3. **Rasio Pendapatan terhadap Biaya:** Mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh suatu program atau layanan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik.

4. **Waktu Penyelesaian Proyek:** Mengukur seberapa cepat proyek atau program diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyelesaian proyek tepat waktu menunjukkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya.

Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi publik sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Efektivitas menilai apakah output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa indikator efektivitas yang umum digunakan dalam sektor publik meliputi:

1. **Tingkat Pencapaian Target Program:** Mengukur sejauh mana program atau proyek mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Tingkat pencapaian target yang tinggi menunjukkan efektivitas program.
2. **Kualitas Layanan Publik:** Mengukur seberapa baik layanan yang diberikan oleh organisasi publik sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup aspek kepuasan pengguna layanan, keandalan, dan aksesibilitas.

3. **Tingkat Kepuasan Masyarakat:** Mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi publik. Survei kepuasan masyarakat sering digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas layanan.
4. **Tingkat Pengurangan Masalah Sosial:** Mengukur dampak dari program atau kebijakan publik dalam mengurangi masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kriminalitas. Indikator ini menunjukkan efektivitas intervensi publik dalam mencapai tujuan sosial.
5. **Jumlah Manfaat Sosial yang Dicapai:** Mengukur jumlah manfaat yang dihasilkan dari program atau kebijakan publik, seperti peningkatan kualitas hidup, kesehatan, atau pendidikan. Semakin besar manfaat yang dicapai, semakin efektif program tersebut.

Contoh Aplikasi

Program Pendidikan di Daerah X:

Efisiensi: Rasio belanja operasional terhadap total belanja adalah 20%, menunjukkan penggunaan dana yang efisien untuk operasional.

Efektivitas: Tingkat kelulusan siswa meningkat dari 75% menjadi 85% dalam satu tahun, menunjukkan efektivitas program pendidikan.

Program Kesehatan di Daerah Y:

Efisiensi: Waktu penyelesaian proyek pembangunan puskesmas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, menunjukkan penggunaan waktu yang efisien.

Efektivitas: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan meningkat dari 70% menjadi 90%, menunjukkan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan.

2. Responsivitas dan Akuntabilitas

Responsivitas dan Akuntabilitas adalah dua indikator kunci dalam mengukur kinerja sektor publik. Kedua indikator ini membantu menilai bagaimana organisasi publik merespons kebutuhan masyarakat dan mempertanggungjawabkan tindakan serta hasil yang dicapai.

a) Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan organisasi publik untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator ini mengukur

seberapa baik organisasi publik dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan eksternal dan memberikan layanan yang diperlukan secara tepat waktu. Beberapa indikator responsivitas yang umum digunakan dalam sektor publik meliputi:

1. **Waktu Tanggap:** Mengukur waktu yang dibutuhkan oleh organisasi publik untuk merespons permintaan, keluhan, atau pertanyaan dari masyarakat. Waktu tanggap yang cepat menunjukkan responsivitas yang baik.
2. **Tingkat Penyelesaian Keluhan:** Mengukur persentase keluhan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat penyelesaian yang tinggi menunjukkan kemampuan organisasi untuk menangani masalah secara efektif.
3. **Kemampuan Adaptasi:** Mengukur seberapa cepat dan efektif organisasi publik dapat menyesuaikan kebijakan, prosedur, atau layanan berdasarkan umpan balik masyarakat atau perubahan situasi. Kemampuan adaptasi yang baik menunjukkan responsivitas yang tinggi.
4. **Ketersediaan Layanan:** Mengukur sejauh mana layanan publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat ketika dibutuhkan. Ketersediaan layanan yang tinggi menunjukkan responsivitas yang baik.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan hasil yang dicapai kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan.

Beberapa indikator akuntabilitas yang umum digunakan dalam sektor publik meliputi:

1. **Transparansi Laporan Keuangan:** Mengukur sejauh mana laporan keuangan disusun dan dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat. Transparansi yang tinggi menunjukkan akuntabilitas yang baik.
2. **Pelaporan Kinerja:** Mengukur frekuensi dan kualitas pelaporan kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelaporan yang teratur dan komprehensif menunjukkan akuntabilitas yang tinggi.
3. **Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi:** Mengukur sejauh mana organisasi publik mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Kepatuhan yang tinggi menunjukkan akuntabilitas yang baik.

4. **Partisipasi Masyarakat:** Mengukur sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan akuntabilitas yang kuat.
5. **Audit dan Evaluasi Eksternal:** Mengukur frekuensi dan hasil audit serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Hasil audit yang positif menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Contoh Aplikasi

Pelayanan Kesehatan di Daerah X:

- a) **Responsivitas:** Waktu tanggap untuk penanganan pasien di puskesmas adalah kurang dari 30 menit, menunjukkan responsivitas yang tinggi dalam memberikan layanan kesehatan.
- b) **Akuntabilitas:** Laporan keuangan dan kinerja puskesmas dipublikasikan setiap triwulan dan dapat diakses oleh masyarakat, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Layanan Perizinan di Kota Y:

- a) **Responsivitas:** Proses perizinan usaha yang sebelumnya memakan waktu 14 hari kini dipersingkat menjadi 7 hari berdasarkan umpan balik masyarakat, menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik.
- b) **Akuntabilitas:** Setiap permohonan izin dilengkapi dengan pelaporan status dan evaluasi yang dipublikasikan secara online, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Kesimpulan

Responsivitas dan akuntabilitas adalah dua indikator penting dalam mengukur kinerja sektor publik. Responsivitas menilai seberapa baik organisasi publik merespons kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat, sementara akuntabilitas menilai sejauh mana organisasi publik mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil yang dicapai. Dengan menerapkan indikator-indikator ini, organisasi publik dapat meningkatkan kinerja mereka dan memenuhi harapan masyarakat secara efektif dan transparan.

14.2.3 Metode dan Teknik Analisis Kinerja Sektor Publik

Analisis kinerja sektor publik adalah proses evaluasi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas organisasi publik dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

Beberapa metode dan teknik yang umum digunakan dalam analisis kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard (BSC) adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi berdasarkan empat perspektif utama:

- a) **Perspektif Keuangan:** Mengukur kinerja keuangan, seperti efisiensi anggaran dan pengelolaan dana publik.
- b) **Perspektif Pelanggan:** Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.
- c) **Perspektif Proses Bisnis Internal:** Mengukur efisiensi dan efektivitas proses internal dalam organisasi publik.
- d) **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan:** Mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf serta inovasi dalam layanan publik (Kaplan & Norton, 1992).

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan organisasi publik. Beberapa rasio keuangan yang digunakan meliputi:

- a) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:** Mengukur kemampuan daerah untuk membiayai aktivitasnya tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2010).
- b) **Rasio Efisiensi Keuangan:** Mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output yang diinginkan (Mardiasmo, 2009).
- c) **Rasio Efektivitas Pendapatan:** Menilai sejauh mana realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Halim, 2007).

3. Benchmarking

Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja organisasi publik dengan organisasi lain yang sejenis atau dengan standar tertentu untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan area yang memerlukan perbaikan. Benchmarking dapat dilakukan secara internal (membandingkan antar unit dalam satu organisasi) atau eksternal (membandingkan dengan organisasi lain).

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal (Siregar, 2012).

5. Evaluasi Program dan Kegiatan

Evaluasi program dan kegiatan adalah proses sistematis untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program-program yang dijalankan oleh organisasi publik. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data, analisis, dan penilaian terhadap hasil yang dicapai serta rekomendasi untuk perbaikan (Bastian, 2006).

6. Analisis Varians

Analisis varians digunakan untuk membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Teknik ini membantu mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta memberikan wawasan tentang efektivitas perencanaan anggaran dan implementasi. Analisis varians melibatkan:

Analisis Varians Pendapatan: Mengidentifikasi varians antara pendapatan yang dianggarkan dan pendapatan yang direalisasikan (Halim, 2007).

Analisis Varians Belanja: Mengidentifikasi varians antara belanja yang dianggarkan dan belanja yang direalisasikan (Mardiasmo, 2009).

7. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi publik. Hasil survei ini memberikan masukan berharga untuk perbaikan kualitas layanan dan peningkatan kinerja organisasi (Mahmudi, 2010).

Kesimpulan

Metode dan teknik analisis kinerja sektor publik mencakup berbagai alat dan pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas organisasi publik. Dengan menggunakan alat-alat ini, organisasi publik dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

14.2.3 Studi Kasus: Evaluasi Kinerja Sektor Publik di Berbagai Bidang Layanan

Evaluasi kinerja sektor publik di berbagai bidang layanan memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi publik mengelola sumber daya dan melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah studi kasus dari beberapa bidang layanan yang berbeda di Indonesia:

1. Layanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta

Indikator Efisiensi dan Efektivitas:

Efisiensi: Rasio belanja operasional terhadap total belanja di sektor kesehatan adalah 65%. Ini menunjukkan penggunaan dana yang efisien untuk mendukung operasional rumah sakit dan puskesmas (Mahmudi, 2010).

Efektivitas: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan meningkat dari 80% menjadi 90% dalam satu tahun. Tingkat kelulusan pelatihan tenaga kesehatan juga mencapai 95%, menunjukkan efektivitas program pelatihan (Bastian, 2006).

Indikator Responsivitas dan Akuntabilitas:

Responsivitas: Waktu tanggap untuk penanganan darurat di rumah sakit besar berkurang dari 30 menit menjadi 20 menit, menunjukkan peningkatan responsivitas layanan kesehatan (Halim, 2007).

Akuntabilitas: Laporan keuangan dan kinerja sektor kesehatan dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik (Mardiasmo, 2009).

2. Layanan Pendidikan di Kota Surabaya

Indikator Efisiensi dan Efektivitas:

Efisiensi: Rasio belanja operasional terhadap total belanja di sektor pendidikan adalah 60%. Penggunaan dana yang efisien mencakup pengeluaran untuk gaji guru, pemeliharaan sekolah, dan bahan ajar (Siregar, 2012).

Efektivitas: Tingkat kelulusan siswa di sekolah-sekolah negeri meningkat dari 85% menjadi 92%. Selain itu, rata-rata nilai ujian nasional juga meningkat, menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan (Mahmudi, 2010).

Indikator Responsivitas dan Akuntabilitas:

Responsivitas: Program bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu diperluas, dan waktu pemrosesan permohonan bantuan dikurangi dari 2 bulan menjadi 1 bulan, menunjukkan peningkatan responsivitas (Bastian, 2006).

Akuntabilitas: Laporan kinerja sekolah dan penggunaan anggaran dipublikasikan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan, menunjukkan akuntabilitas yang baik (Halim, 2007).

3. Layanan Transportasi Umum di Kota Bandung**Indikator Efisiensi dan Efektivitas:**

Efisiensi: Penggunaan anggaran untuk perawatan dan pengoperasian armada transportasi umum tercatat efisien dengan rasio biaya operasional terhadap total anggaran sebesar 55% (Mardiasmo, 2009).

Efektivitas: Penurunan waktu tunggu rata-rata di halte dari 15 menit menjadi 10 menit, serta peningkatan jumlah penumpang harian dari 50.000 menjadi 70.000, menunjukkan peningkatan efektivitas layanan transportasi umum (Mahmudi, 2010).

Indikator Responsivitas dan Akuntabilitas:

Responsivitas: Penambahan rute baru dan peningkatan frekuensi operasional selama jam sibuk untuk merespons kebutuhan pengguna transportasi umum, menunjukkan responsivitas yang baik (Siregar, 2012).

Akuntabilitas: Pengadaan laporan tahunan yang mencakup kinerja operasional dan penggunaan anggaran, serta adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, menunjukkan akuntabilitas yang tinggi (Halim, 2007).

Kesimpulan Studi Kasus

Dari studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja sektor publik di berbagai bidang layanan menunjukkan pentingnya penerapan indikator efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Di sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum, penggunaan dana yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta akuntabilitas yang baik dalam pelaporan dan transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Evaluasi kinerja yang komprehensif membantu organisasi publik dalam mengidentifikasi area perbaikan dan mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat.

14.3 Kinerja Ekonomi Publik

14.3.1 Definisi dan Konsep Kinerja Ekonomi Publik

Definisi Kinerja Ekonomi Publik

Kinerja ekonomi publik mengacu pada hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Ini mencakup kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kinerja ekonomi publik diukur berdasarkan indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan layanan publik.

1. **Hyman (1999)**: Kinerja ekonomi publik didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dan membuat keputusan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan keuangan untuk memengaruhi ekonomi (Hyman, 1999).
2. **Rosen dan Gayer (2008)**: Kinerja ekonomi publik adalah analisis tentang bagaimana pemerintah memutuskan penggunaan sumber daya dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi masyarakat. Fokusnya adalah pada hubungan antara kebijakan fiskal, pendapatan publik, dan

alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial (Rosen & Gayer, 2008).

3. **Gruber (2015):** Kinerja ekonomi publik melibatkan kajian tentang bagaimana pemerintah dapat memecahkan masalah ekonomi dan menyediakan layanan publik. Ini mencakup peran pemerintah dalam redistribusi kekayaan, pembiayaan layanan umum, dan dampak kebijakan publik terhadap masyarakat (Gruber, 2015).
4. **Putra (2018) dan Wahyuningsih (2019):** Kinerja ekonomi publik juga mencakup peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan. Ini mencakup bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Putra, 2018; Wahyuningsih, 2019).

Konsep Kinerja Ekonomi Publik

Kinerja ekonomi publik melibatkan beberapa konsep utama yang membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan ekonomi pemerintah. Beberapa konsep utama termasuk:

1. **Efektivitas Kebijakan Publik:** Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup evaluasi terhadap hasil yang

dicapai dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

2. **Efisiensi Ekonomi:** Efisiensi mengacu pada sejauh mana sumber daya yang tersedia digunakan dengan cara yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dalam kinerja ekonomi publik berarti penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya dengan cara yang paling produktif untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3. **Keadilan dan Distribusi:** Kinerja ekonomi publik juga dinilai berdasarkan bagaimana kebijakan publik berkontribusi pada distribusi pendapatan yang adil dan pengentasan kemiskinan. Keadilan dalam distribusi memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu.
4. **Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama kinerja ekonomi publik. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan produksi, investasi, dan lapangan kerja.

5. **Stabilitas Ekonomi:** Stabilitas ekonomi mengukur kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, dan mengelola siklus ekonomi. Stabilitas ekonomi yang baik menunjukkan bahwa kebijakan publik berhasil menciptakan kondisi yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
6. **Kualitas Layanan Publik:** Penyediaan layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, adalah indikator penting kinerja ekonomi publik. Layanan publik yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kinerja ekonomi publik adalah hasil dari upaya pemerintah dalam mengelola perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Dengan mengukur efektivitas, efisiensi, keadilan, pertumbuhan, stabilitas, dan kualitas layanan publik, kinerja ekonomi publik dapat dievaluasi secara komprehensif. Pemerintah yang berhasil dalam kinerja ekonomi publik mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

14.3.2 Indikator Kinerja Ekonomi Publik

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi publik. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ini penting karena menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan lebih banyak barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output atau produk domestik bruto (PDB) secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Ini sering diukur sebagai persentase perubahan tahunan dalam PDB riil, yang menghilangkan pengaruh inflasi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peningkatan kapasitas produksi ekonomi.

Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi penting karena beberapa alasan:

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:** Dengan meningkatnya output ekonomi, masyarakat memiliki akses

- yang lebih besar terhadap barang dan jasa, yang meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan.
2. **Mengurangi Pengangguran:** Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali diikuti oleh penciptaan lapangan kerja baru, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 3. **Mengurangi Kemiskinan:** Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu.
 4. **Meningkatkan Pendapatan Negara:** Pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan sumber-sumber lainnya, yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik dan investasi dalam infrastruktur.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. **Produk Domestik Bruto (PDB):** PDB adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. PDB riil, yang disesuaikan

dengan inflasi, sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

2. **Pendapatan Nasional Bruto (PNB):** PNB mengukur total pendapatan yang diperoleh oleh warga negara suatu negara, termasuk pendapatan dari investasi di luar negeri. Ini memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi warga negara.
3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):** PDRB adalah ukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB riil digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional.
4. **Laju Pertumbuhan Ekonomi:** Laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB riil dari satu periode ke periode berikutnya. Ini memberikan gambaran tentang kecepatan pertumbuhan ekonomi.
5. **Indeks Produksi Industri:** Indeks ini mengukur perubahan dalam output sektor industri dari waktu ke waktu, memberikan indikasi tentang pertumbuhan di sektor manufaktur dan industri.

Contoh Penerapan

1. **Indonesia:** Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% akibat

dampak pandemi COVID-19. Namun, dengan berbagai kebijakan stimulus fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pulih pada tahun 2021 dengan perkiraan pertumbuhan positif sekitar 3,7% hingga 4,5% (Badan Pusat Statistik, 2021).

2. **Provinsi Jawa Barat:** PDRB Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun 2019 sebelum pandemi. Sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini. Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2019).

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator kinerja ekonomi publik yang penting, karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan suatu negara atau daerah. Dengan memahami dan mengukur pertumbuhan ekonomi melalui berbagai indikator seperti PDB, PNB, dan PDRB, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif adalah

tujuan utama dalam mengelola ekonomi publik untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah salah satu indikator kinerja ekonomi publik yang penting karena mencerminkan bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Distribusi pendapatan yang adil dan merata dianggap sebagai tanda keberhasilan kebijakan ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Definisi Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mengacu pada cara pendapatan atau kekayaan didistribusikan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian. Ini mencakup analisis tentang ketimpangan pendapatan dan bagaimana kekayaan terdistribusi di berbagai kelompok masyarakat.

Pentingnya Distribusi Pendapatan

1. **Keadilan Sosial:** Distribusi pendapatan yang adil membantu dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Ini memastikan bahwa semua anggota

- masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.
2. **Stabilitas Sosial:** Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan konflik. Distribusi pendapatan yang lebih merata membantu dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.
 3. **Pengentasan Kemiskinan:** Distribusi pendapatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan nasional.
 4. **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan:** Pendapatan yang lebih merata dapat mendorong permintaan agregat, karena lebih banyak orang memiliki daya beli yang cukup. Ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator Distribusi Pendapatan

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan meliputi:

1. **Gini Ratio (Gini Index):** Gini ratio adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi. Nilai Gini ratio berkisar antara 0

(distribusi pendapatan yang sempurna merata) hingga 1 (ketimpangan pendapatan yang sempurna). Semakin rendah nilai Gini, semakin merata distribusi pendapatan.

2. Rasio Palma: Rasio Palma membandingkan pendapatan 10% rumah tangga terkaya dengan pendapatan 40% rumah tangga termiskin. Rasio yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata.
3. Kurva Lorenz: Kurva Lorenz adalah representasi grafis dari distribusi pendapatan atau kekayaan. Kurva ini menunjukkan persentase total pendapatan yang diterima oleh persentase kumulatif rumah tangga. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (garis kesetaraan sempurna), semakin besar ketimpangan pendapatan.
4. Quintile Share Ratio: Indikator ini membandingkan pendapatan rata-rata dari 20% populasi terkaya dengan 20% populasi termiskin. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar.

Contoh Penerapan

1. Indonesia: Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Gini ratio Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,385, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan redistributif seperti program bantuan sosial dan

subsidi untuk mengurangi ketimpangan ini (Badan Pusat Statistik, 2021).

2. Denmark: Denmark dikenal dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Pada tahun 2020, Gini ratio Denmark adalah 0,27, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan sosial dan ekonomi dalam menciptakan kesetaraan. Kebijakan pajak progresif dan program kesejahteraan sosial berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata (Eurostat, 2020).

Kesimpulan

Distribusi pendapatan adalah indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi publik. Dengan memahami dan mengukur distribusi pendapatan melalui indikator seperti Gini ratio, rasio Palma, dan kurva Lorenz, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Distribusi pendapatan yang lebih merata tidak hanya meningkatkan keadilan sosial tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sosial.

14.3.3 Metode dan Teknik Analisis Kinerja Ekonomi Publik

Analisis kinerja ekonomi publik melibatkan berbagai metode dan teknik untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa metode dan teknik yang umum digunakan:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data kinerja ekonomi publik melalui statistik seperti mean, median, modus, varians, dan standar deviasi. Metode ini memberikan gambaran umum tentang distribusi, tren, dan karakteristik data ekonomi publik.

Contoh Aplikasi:

Menggunakan rata-rata dan standar deviasi untuk menganalisis distribusi pendapatan di suatu daerah (Hyman, 1999).

2. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen (misalnya, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan) dengan variabel dependen (misalnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan).

Contoh Aplikasi:

Menganalisis dampak pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Rosen & Gayer, 2008).

3. Analisis Input-Output

Analisis input-output mengukur hubungan antara berbagai sektor ekonomi dan dampak pengeluaran di satu sektor terhadap sektor lainnya. Teknik ini digunakan untuk memahami struktur ekonomi dan interaksi antar sektor.

Contoh Aplikasi:

Menggunakan matriks input-output untuk menganalisis dampak investasi infrastruktur terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian (Gruber, 2015).

4. Analisis Cost-Benefit

Analisis cost-benefit digunakan untuk menilai manfaat ekonomi dari suatu kebijakan atau proyek dibandingkan dengan biayanya. Metode ini membantu dalam pengambilan keputusan mengenai apakah suatu kebijakan atau proyek layak untuk diimplementasikan.

Contoh Aplikasi:

Mengevaluasi proyek pembangunan jalan baru dengan membandingkan biaya konstruksi dan pemeliharaan dengan

manfaat ekonomi seperti pengurangan waktu perjalanan dan peningkatan aktivitas ekonomi (Putra, 2018).

5. Analisis Efisiensi Data Envelopment Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari unit-unit pengambilan keputusan (misalnya, sekolah, rumah sakit) dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output.

Contoh Aplikasi:

Mengukur efisiensi sekolah dalam menggunakan anggaran pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas (Wahyuningsih, 2019).

6. Analisis Indeks Gini

Analisis indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi. Indeks Gini memberikan nilai antara 0 (distribusi pendapatan merata) hingga 1 (ketimpangan pendapatan sempurna).

Contoh Aplikasi:

Menggunakan indeks Gini untuk mengevaluasi perubahan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2021).

7. Analisis Multidimensi Kesejahteraan

Analisis multidimensi kesejahteraan mengevaluasi berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Teknik ini menggunakan indeks komposit untuk menggabungkan berbagai indikator menjadi satu ukuran kesejahteraan.

Contoh Aplikasi:

Menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kemajuan kesejahteraan di berbagai daerah (United Nations Development Programme, 2020).

8. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu kebijakan atau program ekonomi. Teknik ini membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan.

Contoh Aplikasi:

Menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi (Siregar, 2012).

Kesimpulan

Metode dan teknik analisis kinerja ekonomi publik menyediakan alat yang beragam untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak kebijakan ekonomi publik. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

14.3.4 Studi Kasus: Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Publik Terhadap Pembangunan

Analisis dampak kebijakan ekonomi publik terhadap pembangunan sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian. Berikut adalah beberapa studi kasus yang mengilustrasikan analisis dampak kebijakan ekonomi publik terhadap pembangunan:

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia

Latar Belakang: Pemerintah Indonesia meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai respons terhadap krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19. Program ini bertujuan

untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan guna meningkatkan daya beli mereka dan mendorong konsumsi domestik.

Metode Analisis:

Analisis Statistik Deskriptif: Untuk menggambarkan distribusi penerima BLT di berbagai wilayah dan kelompok pendapatan.

Analisis Regresi: Untuk mengidentifikasi hubungan antara penerimaan BLT dengan perubahan tingkat konsumsi rumah tangga.

Survei Kepuasan Masyarakat: Untuk mengukur kepuasan penerima terhadap program BLT dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Hasil:

Efektivitas: Program BLT berhasil meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga miskin, yang terlihat dari peningkatan rata-rata konsumsi bulanan sebesar 15% di antara penerima bantuan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Efisiensi: Penyaluran bantuan yang cepat dan tepat sasaran menunjukkan efisiensi program, dengan sebagian besar penerima melaporkan bahwa bantuan diterima tepat waktu.

Keadilan: Distribusi bantuan yang merata di seluruh provinsi menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

2. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah

Latar Belakang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan jalan tol, jembatan, dan bandara.

Metode Analisis:

Analisis Input-Output: Untuk mengukur dampak pembangunan infrastruktur terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian.

Analisis Cost-Benefit: Untuk mengevaluasi manfaat ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan biaya investasi infrastruktur.

Analisis SWOT: Untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kebijakan infrastruktur ini.

Hasil:

Efektivitas: Proyek infrastruktur berhasil meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, yang terlihat dari

peningkatan arus barang dan penumpang sebesar 20% setelah selesainya proyek (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2021).

Efisiensi: Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai jadwal dan anggaran, menunjukkan manajemen proyek yang efisien.

Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat sebesar 5,7% setelah implementasi proyek infrastruktur, dengan kontribusi signifikan dari sektor transportasi dan logistik.

3. Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Surabaya

Latar Belakang: Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah guna meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Metode Analisis:

Analisis Statistik Deskriptif: Untuk mengukur perubahan angka partisipasi sekolah sebelum dan sesudah kebijakan.

- 1) **Analisis Regresi:** Untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan pendidikan gratis dengan prestasi akademik siswa.
- 2) **Survei Kepuasan Masyarakat:** Untuk menilai kepuasan orang tua dan siswa terhadap kebijakan pendidikan gratis.

Hasil:

- 1) **Efektivitas:** Angka partisipasi sekolah meningkat dari 85% menjadi 95% setelah kebijakan diterapkan, menunjukkan peningkatan akses pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2020).
- 2) **Efisiensi:** Kebijakan ini dijalankan dengan baik tanpa penambahan signifikan pada anggaran pendidikan, menunjukkan penggunaan dana yang efisien.
- 3) **Kualitas Pendidikan:** Peningkatan prestasi akademik siswa terlihat dari rata-rata nilai ujian nasional yang meningkat sebesar 10%.

Kesimpulan Studi Kasus

Analisis dampak kebijakan ekonomi publik terhadap pembangunan menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian. Program BLT di Indonesia, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, dan kebijakan pendidikan gratis di Surabaya adalah contoh kebijakan yang berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan akses pendidikan. Metode analisis yang digunakan dalam studi kasus ini, seperti analisis statistik deskriptif, analisis regresi, dan analisis cost-benefit,

membantu dalam mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan tersebut.

14.4 Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja

1. Tantangan dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah, Sektor Publik, dan Ekonomi Publik

- a) **Keterbatasan Sumber Daya Keuangan:** Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.
- b) **Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi:** Kinerja sektor publik sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan. Hal ini mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan kemampuan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif.
- c) **Birokrasi dan Regulasi yang Rumit:** Birokrasi yang berbelit-belit dan regulasi yang rumit dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi program. Ini

menciptakan inefisiensi dan dapat mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

- d) **Transparansi dan Akuntabilitas yang Rendah:** Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini juga dapat membuka peluang untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- e) **Tantangan Eksternal:** Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, bencana alam, dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kinerja ekonomi publik dan mengganggu rencana pembangunan.

2. Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah, Sektor Publik, dan Ekonomi Publik

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- a) **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Mengembangkan berbagai sumber pendapatan baru, seperti pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

- b) **Perbaikan Sistem Administrasi Pajak:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi pajak melalui digitalisasi dan penguatan pengawasan.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM:

- a) **Pelatihan dan Pendidikan:** Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial.
- b) **Reformasi Birokrasi:** Melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap perubahan.

3. Penyederhanaan Birokrasi dan Regulasi:

- a) **Revisi dan Harmonisasi Regulasi:** Menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi yang tumpang tindih atau kontradiktif untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
- b) **Pelayanan Publik Berbasis Elektronik:** Mengimplementasikan sistem pelayanan publik berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

- a) **Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit:** Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta melakukan audit secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b) **Partisipasi Publik:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

5. Mengatasi Tantangan Eksternal:

- a) **Diversifikasi Ekonomi:** Mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap fluktuasi ekonomi global untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu.
- b) **Pembangunan Berkelanjutan:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi publik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam.

Kesimpulan

Menghadapi tantangan dalam peningkatan kinerja keuangan daerah, sektor publik, dan ekonomi publik membutuhkan strategi

yang komprehensif dan terintegrasi. Optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi dan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta adaptasi terhadap tantangan eksternal adalah beberapa langkah penting yang harus diambil. Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dapat meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

14.4.1 Tantangan dalam Mengukur dan Meningkatkan Kinerja

Mengukur dan meningkatkan kinerja adalah tantangan yang kompleks bagi banyak organisasi. Tantangan-tantangan ini dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek berikut:

1. **Definisi dan Indikator Kinerja yang Tepat:** Tantangan utama dalam mengukur kinerja adalah menentukan definisi kinerja yang tepat dan indikator-indikator yang relevan. Setiap organisasi mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai kinerja yang baik. Indikator kinerja yang dipilih harus relevan dengan tujuan organisasi, dapat diukur secara objektif, dan dapat diandalkan. Misalnya, dalam konteks bisnis, kinerja dapat

mencakup aspek finansial seperti profitabilitas, serta non-finansial seperti kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Menentukan indikator yang tepat ini memerlukan pemahaman mendalam tentang strategi dan tujuan jangka panjang organisasi (Neely, Adams, & Kennerley, 2002; Kaplan & Norton, 1996).

2. **Pengumpulan dan Analisis Data:** Setelah indikator kinerja ditentukan, tantangan berikutnya adalah pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu. Data harus diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan dikelola dengan sistem yang efisien. Selain itu, kemampuan untuk menganalisis data dengan metode yang tepat sangat penting untuk mendapatkan wawasan yang akurat tentang kinerja. Analisis yang salah atau tidak lengkap dapat mengarah pada kesimpulan yang menyesatkan dan keputusan yang tidak efektif (Davenport & Harris, 2007; Marr, 2012).
3. **Budaya Organisasi dan Perubahan:** Meningkatkan kinerja seringkali memerlukan perubahan dalam budaya organisasi dan perilaku individu. Menciptakan budaya yang mendukung peningkatan kinerja membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang efektif. Karyawan harus termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kinerja dan merasa dihargai atas kontribusinya. Selain itu, perubahan

prosedur dan proses kerja yang sudah lama ada dapat menghadapi resistensi dari karyawan. Memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menerima perubahan ini adalah kunci untuk sukses dalam upaya peningkatan kinerja (Schein, 2010; Kotter, 1996).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi dapat lebih efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar.

14.3.5 Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah

Strategi peningkatan kinerja keuangan daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- a) **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Meningkatkan jumlah dan jenis sumber pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi lokal, seperti pariwisata, industri kreatif, dan pertanian (Halim, 2014).
- b) **Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi:** Mengoptimalkan sistem pemungutan pajak

dan retribusi melalui modernisasi teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengawasan yang ketat (Syahrudin, 2018).

2. **Pengelolaan Anggaran yang Efisien:**

- a) **Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja:** Menerapkan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk memastikan setiap alokasi dana memiliki tujuan dan indikator pencapaian yang jelas (Mardiasmo, 2009).
- b) **Pengendalian Belanja Daerah:** Melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap belanja daerah, terutama untuk belanja operasional yang tidak mendesak, serta memprioritaskan belanja modal yang memiliki dampak jangka panjang (Mahmudi, 2016).

3. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan Daerah:**

- a) **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi:** Mengadakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur keuangan daerah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan (Kementerian Dalam Negeri RI, 2020).

- b) **Reformasi Birokrasi:** Melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien (Syahrudin, 2018).

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi:

- a) **Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA):** Menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2014).
- b) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti melalui e-budgeting dan e-audit (Mardiasmo, 2009).

5. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah:

- a) **Kerjasama Regional:** Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam hal pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi regional untuk menciptakan sinergi dan efisiensi (Mahmudi, 2016).
- b) **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Mendorong kerjasama dengan sektor swasta melalui skema Public-

Private Partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Syahrudin, 2018).

6. **Pemanfaatan Potensi Investasi:**

- a) **Promosi Investasi Daerah:** Meningkatkan upaya promosi investasi dengan menyusun kebijakan yang ramah investasi, memperbaiki iklim usaha, dan memberikan insentif kepada investor (Kementerian Dalam Negeri RI, 2020).
- b) **Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):** Mengembangkan kawasan ekonomi khusus yang dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Halim, 2014).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan kinerja keuangan daerah dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

14.3.6 Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Publik

Strategi peningkatan kinerja sektor publik memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan meliputi:

1. Reformasi Birokrasi:

- a) **Penyederhanaan Proses dan Prosedur:** Melakukan penyederhanaan dan standarisasi proses birokrasi untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi layanan (Dwiyanto, 2011).
- b) **Penguatan Sistem Pengawasan Internal:** Memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur serta mencegah terjadinya korupsi (Kementerian PANRB, 2018).

2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia:

- a) **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi:** Menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi aparatur negara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka (Sedarmayanti, 2009).
- b) **Sistem Merit:** Menerapkan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja untuk

memastikan bahwa aparatur yang terbaik yang menduduki posisi strategis (Rivai, 2015).

3. Penggunaan Teknologi Informasi:

- a) **E-Government:** Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan publik (Mardiasmo, 2009).
- b) **Data-Driven Decision Making:** Memanfaatkan data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti (Davenport & Harris, 2007).

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

- a) **Pelaporan dan Audit Publik:** Memastikan adanya pelaporan yang transparan dan audit publik yang rutin untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik (Mardiasmo, 2009).
- b) **Partisipasi Publik:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2011).

5. Inovasi dan Pengembangan Layanan:

- a) **Pengembangan Layanan Berbasis Inovasi:** Mendorong inovasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan dan penerapan praktik terbaik dan teknologi terbaru (Osborne & Brown, 2005).
- b) **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Mengimplementasikan standar pelayanan publik yang jelas dan mengukur kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985).

6. Pengelolaan Keuangan yang Efisien:

- a) **Anggaran Berbasis Kinerja:** Menerapkan anggaran berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana memiliki tujuan dan indikator pencapaian yang jelas (Mahmudi, 2016).
- b) **Pengawasan dan Evaluasi Keuangan:** Melakukan pengawasan dan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien (Sedarmayanti, 2009).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, sektor publik dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

14.3.7 Strategi Peningkatan Kinerja Ekonomi Publik

Strategi peningkatan kinerja ekonomi publik melibatkan berbagai pendekatan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa strategi utama:

1. Peningkatan Infrastruktur:

- a) Investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dapat memperlancar arus barang dan jasa. Infrastruktur yang baik juga mendukung mobilitas tenaga kerja dan akses ke pasar yang lebih luas.
- b) **Sumber:** Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(suppl_1), i13-i87.

2. Reformasi Kebijakan Pajak:

- a) Penyesuaian kebijakan pajak untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pajak yang baik juga dapat mendorong investasi dan kegiatan ekonomi.
- b) **Sumber:** Keen, M., & Konrad, K. A. (2013). The theory of international tax competition and coordination. *Handbook of Public Economics*, 5, 257-328.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):

- a) Investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b) **Sumber:** Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. *Journal of Economic Growth*, 17(4), 267-321.

4. Deregulasi dan Peningkatan Iklim Usaha:

- a) Pengurangan birokrasi dan regulasi yang tidak perlu dapat mendorong kegiatan usaha dan investasi. Kebijakan yang memudahkan pembukaan usaha baru serta perlindungan hak properti adalah kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- b) **Sumber:** Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M. (2006). Regulation and growth. *Economics Letters*, 92(3), 395-401.

5. Penguatan Jaringan Keamanan Sosial:

- a) Program perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan bantuan sosial dapat mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Jaringan keamanan sosial yang kuat juga mendukung stabilitas ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat.
- b) **Sumber:** Barrientos, A., & Hulme, D. (2009). Social protection for the poor and poorest: An introduction. In *Social Protection for the Poor and Poorest* (pp. 1-18). Palgrave Macmillan, London.

Strategi-strategi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai kinerja ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Implementasi yang efektif dan

berkelanjutan dari strategi-strategi ini akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, dkk. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Medan: Cipta pustaka Media.
- Awary, N., Aji, T. S., Wasil, M., Fisabilillah, L. W. P., Hanifa, N., Hutabarat, R. E., & Restikasari, W. (2024). Community Services for the Children of Migrant Labors through Informal Education to Support SDGS in Hulu Kelang Selangor Learning Places. *International Journal Of Community Service*, 4(2), 140–144.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2019). PDRB Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2021). Laporan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Laporan Program Bantuan Langsung Tunai.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Danial, D., Nurjannah, N., & Mirna, M. 2019. *Evaluation of The Learning*.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Review Press.
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2020). Laporan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Gratis.

- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elsandy, R., & Wasil, M. (2023). *International Journal of Social Science And Human Research*.
- Eurostat. (2020). Income distribution statistics.
- Gruber, J. (2015). *Public Finance and Public Policy*. New York: Worth Publishers.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hyman, D. N. (1999). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. Harcourt Brace College Publishers.
- Hyman, David N. 1999. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. The Dryden Press. Harcourt Brace College Publishers.
- Jonathan Gruber. 2015. *Public Finance and Public Policy*. New York: Worth Publishers
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press.
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*,

2(1), 27–41.

- Kementerian PANRB. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Khusaini, A. (2006). Desentralisasi fiskal dan strategi APBD. Ghalia Indonesia.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE UNIBRAW)6.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
- Kuncoro, A. (2018). Otonomi daerah dan pembangunan. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Otonomi Daerah dan Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkusubroto, Guritno. 2000. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marr, B. (2012). *Key Performance Indicators: The 75 Measures Every Manager Needs to Know*. Pearson Education.
- Minggus, T., Wasil, M., & Dharmani, I. G. A. A. N. (2020). The Impact of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, and

Total Asset Turnover Towards The Profit Changes Of Mining Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *Quantitative Economics and Management Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.35877/454ri.qems89>

Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (konsep dan aplikasi berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik), Bandung; Afabeta.

Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*. London: Financial Times/Prentice Hall.

Nur'aini, S., & Wasil, M. (2024). Analysis of the Effect of ICT on Poverty Reduction at the National Level. *Media Trend*, 19(1).

Osborne, S. P., & Brown, K. (2005). *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. Routledge.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research*. *Journal of Marketing*.

Pertiwi, R. D. Y., & Wasil, M. (2024). *Tax Planning And Deferred Tax Expense On The Value Of Multinational Companies In Indonesia*. Program of Mathematics Study Program at Islamic Institute Of

Putra, A. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rivai, V. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohma, B. M., & Wasil, M. (2019). Effect Of Enrichment And Empowerment On Competency In Improving Employee Performance. *Jurnal Ekonomi*, 19(2), 46–52.
- Rosen Harvey S. & Gayer, Ted. 2008. *Public Finance*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. John Wiley & Sons.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, S. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report*.
- Wahed, M., & Wasil, M. (2021). Optimalisasi Keuangan Kelompok Usaha Wanita Di Kelurahan Wates Kota Mojokerto. *SenSaSi*, 1(1), 89–98.

- Wahyuningsih, E. (2019). *Ekonomi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik*. Depok: RajaGrafindo.
- Wasil, M. (2017). Analysis Of The Role Of Leading Manufacturing Sector And Its Impact On Economic Growth In East Java (Using Input-Output Table Of 2010). *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, 3(1), 35–52.
- Wasil, M. (2024). The Effect of Tax, General Allocation Fund, and Retribution on Regional Expenditure. *The Spirit Of Society Journal: International Journal of Society Development and Engagement*, 7(2), 123–129
- Wasil, M., & Wahed, M. (2018). Pemetaan Potensi Dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mengurangi Ketimpangan Wilayah Kabupaten Mojokerto. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 1(2).

BIODATA PENULIS



Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Penulis adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Penulis memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar Doktor di bidang Ekonomi, Magister Ekonomi, dan Sarjana Pendidikan, dengan background S1 di Universitas Negeri Malang (UM), S2 Universitas Brawijaya Malang (UB) dan S3 di Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR). Penulis dikenal sebagai seorang akademisi yang berdedikasi, dengan keahlian khusus dalam bidang ilmu ekonomi. Selain mengajar, beliau aktif melakukan penelitian dan publikasi di berbagai jurnal ilmiah. Komitmennya terhadap dunia pendidikan dan ekonomi tercermin

dalam kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan kurikulum dan program studi di UNESA. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, menunjukkan dedikasi penuh untuk memajukan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi bagi generasi muda. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mohammadwasil@unesa.ac.id

=====000=====

BIODATA PENULIS



Hendry Cahyono, S.E., M.E

Dosen Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Hendry Cahyono, Lahir di Pamekasan, 25 Juni 1985. menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Pamekasan. Tahun 2003 sampai 2007, menempuh pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Melanjutkan studi Magister Ilmu ekonomi di kampus yang sama sampai tahun 2009. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi program Doktorat Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sejak 2009 menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

dengan mengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Regional, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Politik. Telah menerbitkan beberpa buku referensi, buku ajar di bidang ekonomi dan menulis artikel yang diterbitkan jurnal bereputasi baik dalam negeri maupun internasional dan menghasilkan puluhan judul penelitian di bidang ekonomi. Sebagai Ketua Program Studi S1 Ekonomi FEB Unesa sejak 2017 sampai 2023. Saat ini aktif sebagai peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan FEB Unesa.

=====000=====

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Rachmawati S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Lahir di Jember, 30 Mei 1983. Pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di tempuh di Jember. Tahun 2001 sampai 2005 menempuh Pendidikan S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Jember. Tahun 2005-2008 melanjutkan Pendidikan S-2 Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran. Pada 2012-2017 menempuh Pendidikan S-3 Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga. Sejak 2009 menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dan

mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, Ekonomi Publik, Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan, Ekonomi Sumberdaya Alam, Ekonomi Demografi, Statistika Ekonomi dan Ekonometrika. Sudah menulis beberapa jurnal bereputasi baik dalam negeri maupun internasional dan menghasilkan puluhan judul penelitian di bidang Ekonomi Sumber Daya. Alamat email: luckyrachmawati@unesa.ac.id.

=====000=====

BIODATA PENULIS



Wenny Restikasari, M.SE.

Dosen Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Meraih gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Pembangunan di Universitas Airlangga tahun 2018. Mendapatkan gelar Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga pada tahun 2021. Saat ini bekerja sebagai dosen di prodi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Ketertarikan penelitian pada isu-isu perencanaan pembangunan.

=====000=====

BIODATA PENULIS



Aminudin Ma'ruf, M.Sc.

Dosen Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Penulis merupakan dosen di Prodi Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Merupakan lulusan dari INCEIF University Malaysia dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Minat penelitiannya meliputi keuangan Islam, perbankan Islam dan etika dalam ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini aktif menulis di bidang tersebut dan beberapa karyanya telah dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email aminudinmaruf@unesa.ac.id.

=====000=====

EKONOMI PUBLIK

Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah menggunakan instrumen ekonomi untuk memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai konsep dan teori dasar dalam ekonomi publik, seperti kebijakan fiskal, pajak, belanja pemerintah, dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan serta efisiensi ekonomi.


Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ekonomi publik, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta para praktisi yang berkecimpung di bidang ekonomi dan kebijakan publik.



ISBN 978-623-10-1922-6



✉ bravopressindonesia@gmail.com

🌐 www.bravopress.id  [bravo_press](https://www.instagram.com/bravo_press)